



**PEMERINTAH KOTA PALOPO  
INSPEKTORAT**

Jalan Andi Masjaya No. 19 Telp. (0471) 325398  
**PALOPO**

---

**LAPORAN HASIL REVIU**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA PALOPO  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**NOMOR : 700.043.03/049/INSPK/III/2022  
TANGGAL : 28 MARET 2022**



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**INSPEKTORAT**  
Jalan Andi Masjaya No. 19 Telp. (0471) 325398  
**PALOPO**

---

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Palopo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palopo, 28 Maret 2022



Inspektur,

Drs. H. Asir MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 196305011992031015



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**INSPEKTORAT**  
Jalan Andi Masjaya No. 19 Telp. (0471) 325398  
**PALOPO**

---

Palopo, 28 Maret 2022

**K e p a d a**

**Yth. Walikota Palopo**  
**di -**  
**P a l o p o.-**

Nomor :700.043.03/ 049 /InspK/III/2022  
Sifat :-  
Lampiran :-  
Perihal :Laporan Hasil Reviu  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kota Palopo Tahun 2021

---

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun 2021 , sebagai berikut :

**1. Pernyataan Reviu**

Tim Inspektorat Kota Palopo telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Palopo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021

**2. Dasar Reviu**

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Surat Tugas Inspektur Kota Palopo Nomor:094/039/Insp./III/2022 ,tanggal 21 Maret 2021



### 3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo untuk Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 31 Maret 2022

### 4. Tujuan dan Sasaran Reviu

- Tujuan reviu adalah
  - a. Membantu Penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palopo
  - b. untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Pemerintah Kota Palopo, sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas
- Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021.

### 5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021.

### 6. Tim Reviu :

Penanggung Jawab	: Inspektur Kota Palopo
Supervisor	: Baharuddin, SP
Pengendali Tekhnis	: Drs.Syarifuddin, M.Si
Ketua Tim	: Herlina, SE
Anggota	: - H. Karyawan A. Ihsan - Hamsir, SE - Dewi Anriani, SE - A. Raju, SE - Habel Basongan, S.AN

### 7. Simpulan dan Rekomendasi

#### A. Simpulan

##### A.1 Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**a) Dalam Bab I Pendahuluan , telah memuat**

- Latar belakang, Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- Data Penting Instansi Pemerintah Kota Palopo antara lain :  
Gambaran umum kota Palopo (Luas dan Batas Wilayah administratif,Jumlah Penduduk, kondisi topografis, ,struktur organisasi perangkat Daerah Sesuai Perda nomor 8 tahun 2016, yang menetapkan 29 Dinas, 7 Badan, 2 Sekretariat, 2 Rumah Sakit Umum Daerah, 9 Kecamatan), Data jumlah PNS.
- Sasaran dan permasalahan pembangunan Daerah
- Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2021
- Sistematika Penyusunan

**b) Dalam Bab II Perencanaan Kinerja, telah memuat:**

- Rencana Strategis
- Visi dan Misi
- Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
- Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021, yang merupakan target kinerja Pemerintah Kota Palopo.
- Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021.

**c) Dalam Bab III, Akuntabilitas Kinerja , telah memuat:**

- Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 , secara memadai.
- Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021
- Laporan Kinerja (LKj) telah membandingkan realisasi kinerja dan capaian Kinerja tahun 2020 dan tahun 2021
- Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2021.
- Laporan Kinerja telah menyajikan realisasi anggaran (Pendapatan dan Belanja) Tahun 2021

**d) Dalam Bab IV, Penutup**

- Laporan Kinerja telah menyajikan Simpulan capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2021, yaitu sebesar 94,53 %
- Laporan Kinerja telah menyajikan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan Kinerja di masa yang akan datang.

**A.2. Mekanisme Penyusunan**

Kesimpulan terhadap Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Palopo telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu, dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo.
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data Perjanjian Kinerja;
- c. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja, berupa surat edaran, tetapi belum didukung dengan adanya SOP.
- d. Penanggungjawab pengumpulan data/informasi belum ditetapkan di setiap unit kerja, dengan keputusan Walikota.
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja diyakini keandalannya;
- f. Bahwa dalam penjelasan Laporan Kinerja (LKj), telah diketahui oleh unit kerja terkait.
- g. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Palopo tahun 2021, bukan merupakan gabungan dari unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah(OPD).

2. Dalam hal Mekanisme Penyusunan, agar :
- Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja didukung dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.
  - Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja didukung dengan adanya SOP. Serta adanya penetapan penanggung jawab pengumpulan data di setiap Unit kerja/ Organisasi Perangkat Daerah.
3. Dalam hal Substansi, agar:
- Dalam Penyusunan Laporan Kinerja, agar menyajikan perbandingan Capaian Kinerja tahun yang dilaporkan, dengan beberapa tahun sebelumnya.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Mengetahui :  
Supervisor

  
Baiyafuddin, SP

Nip. 197112011998031014

Pengendali Tekhnis

  
Drs. Syarifuddin, M.Si

Nip. 197303041992021001

Penanggung Jawab  
Inspektur,

  
Drs. H. Asir, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 196305011992031015

Tim Pemeriksa

1. Herlina, SE

Nip. 197303152005022002

2. H. Karyawan A. Ihsan

NIP. 196204231986031019

3. Hamsir, SE

Nip. 197310012008042001

4. Dewi Antiani, SE

Nip. 197501262000122005

5. Andi Raju, SE

Nip. 19752909200901200

6. Habel Basongan, S.AN

Nip. 198007102007011010





**PEMKOT  
PALOPO**



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN 2021**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban tahun ketiga pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Palopo. Hal ini juga sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuju terciptanya **Good Governance** dan **Clean Government**. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Palopo tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 ini bermanfaat sehingga dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun mendatang.

Palopo,                      Maret 2022

WALIKOTA PALOPO,



Drs. H.M.JUDAS AMIR, MH

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Palopo telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 yang mengacu kepada Pedoman Penyusunan LAKIP yang diterbitkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang berisikan tentang keberhasilan, kegagalan, kegiatan yang belum sempat dilaksanakan, faktor pendukung keberhasilan dan hambatan melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palopo.

Tahun 2021 adalah pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kota Palopo tahun ketiga, dalam upaya pencapaian tujuan secara umum melalui indikator-indikator sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2023.

Kinerja yang diukur dalam LAKIP ini didasarkan atas dokumen perubahan RPJMD tahun 2018 - 2023, Renstra dan Penetapan Kinerja Daerah Kota Palopo tahun 2021. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palopo berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran, yaitu dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar **94,53%** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur serta teruji kelayakannya.

Dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palopo tentang Indikator Kinerja Utama, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja utama :  
Capaian kinerja seluruh indikator kinerja adalah sangat tinggi atau melampaui target yang ditetapkan
- Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja :  
Capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja adalah sangat tinggi dan 1 indikator berkinerja sedang
- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :  
Capaian kinerjanya, sebanyak 3 indikator kinerja kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 1 indikator kinerja kategori Tinggi dan 1 indikator lainnya kategori sedang
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :  
Capaian kinerja seluruh indikator kinerja adalah sangat tinggi atau melampaui target yang ditetapkan



- Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :  
Capaian kinerjanya, sebanyak 1 indikator kategori Sangat Tinggi, 1 indikator rendah dan 1 indikator lainnya kategori sangat rendah

Hasil analisis pencapaian kinerja terhadap 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama, diketahui bahwa :

- 13 indikator atau 68,42% Pencapaian Kinerjanya Sangat Tinggi,
- 3 indikator atau 15,78% Pencapaian Kinerjanya Tinggi,
- 1 indikator atau 5,26% Pencapaian Kinerjanya Sedang,
- 1 indikator atau 5,26% Pencapaian Kinerjanya Rendah.
- 1 indikator atau 5,26% pencapaiannya sangat rendah

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja utama terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 11 sasaran yang mencakup 19 indikator kinerja, diketahui bahwa 13 indikator kinerja atau 68,42% mencapai kategori **Sangat Tinggi**, 3 indikator sasaran atau 15,78% kategori **Tinggi**, 1 indikator sasaran atau 5,26% memperoleh kategori **Sedang**, 1 indikator sasaran atau 5,26% **Rendah** , dan 1 indikator sasaran atau 5,26% kinerjanya **Sangat Rendah**. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 94,53% atau bermakna **Sangat Tinggi**. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021 **“SANGAT TINGGI”**.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Kota Palopo.....	3
1.3.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif .....	3
1.3.2 Jumlah Penduduk .....	4
1.3.3 Kondisi Topografi .....	5
1.4 Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo .....	7
1.4.1 Sumber Daya Aparatur .....	8
1.5 Sasaran dan Permasalahan Pembangunan Daerah .....	9
1.5.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2021 .....	11
1.5.6 Sistematika Penyusunan .....	11
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	13
2.2 Perjanjian Kinerja .....	17
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja .....	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 .....	29
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 .....	41
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip – prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai – nilai akuntabilitas menuju good governance yakni pemerintahan Kota Palopo yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus



dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat pula digunakan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2021 yang kemudian diubah dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2019 merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Palopo yang tentunya mengacu pada Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2023.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2018-2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2021 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Palopo selama Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Palopo pada Tahun 2021;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palopo di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Palopo dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

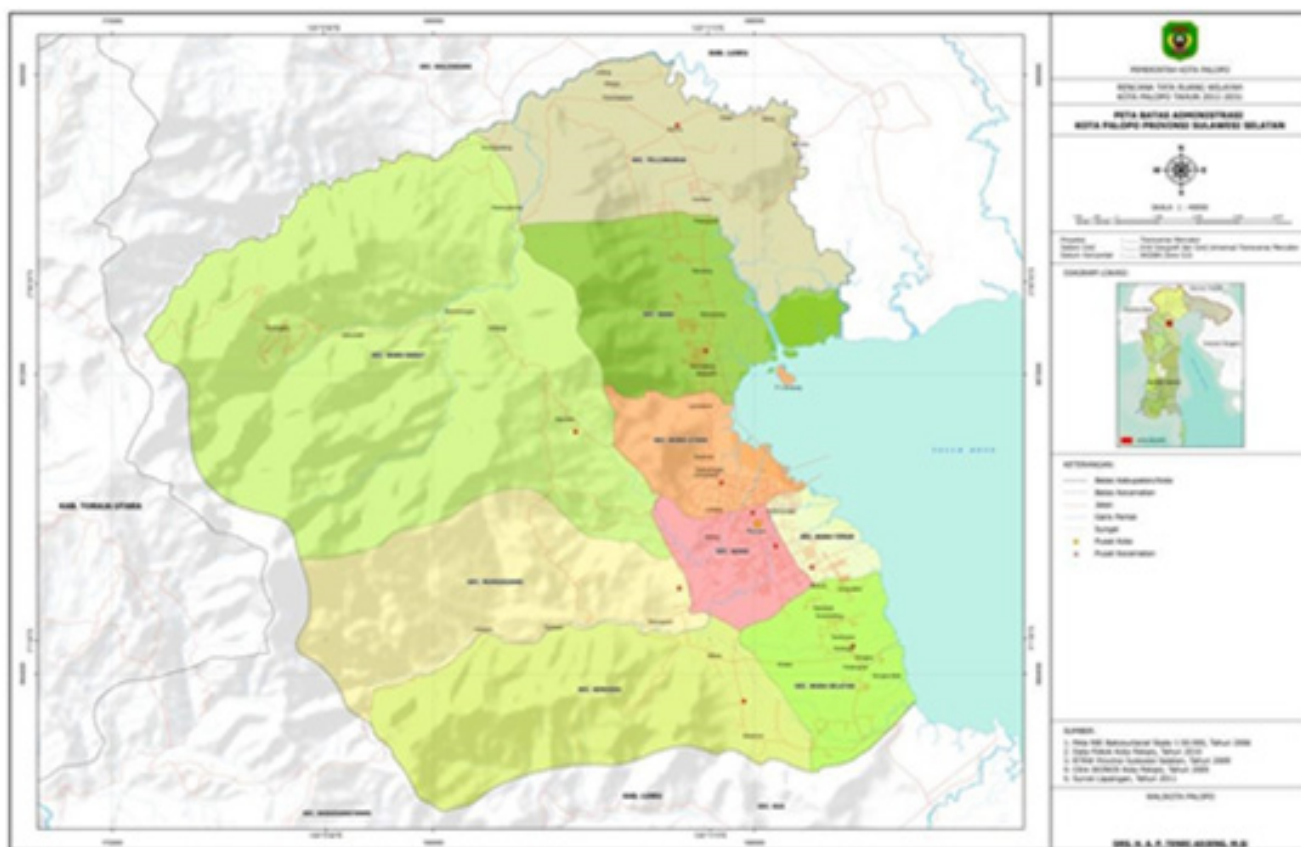
### 1.3. GAMBARAN UMUM KOTA PALOPO

#### 1.3.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara administratif, Kota Palopo memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
- Sebelah Timur dengan Teluk Bone;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Tondong Nanggala Kabupaten Toraja Utara.

#### Peta Administratif



Secara geografis, Kota Palopo terletak antara **2°53'.15"** - **3°04'.08"** Lintang Selatan dan **120°03'.10"** - **120°14'.34"** Bujur Timur dengan luas wilayah ± 247,52 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km<sup>2</sup> dan yang tersempit adalah

kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km<sup>2</sup>. Adapun luas wilayah menurut kecamatan di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

### Luas wilayah dan Pembagian Wilayah menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Presentase (%)
1.	Wara Selatan	4	10,66	4,31
2.	Sendana	4	37,09	14,98
3.	Wara	6	11,49	4,64
4.	Wara Timur	7	12,08	4,88
5.	Mungkajang	4	53,80	21,74
6.	Wara Utara	6	10,58	4,27
7.	Bara	5	23,35	9,43
8.	Telluwana	7	34,34	13,87
9.	Wara Barat	5	54,13	21,87
Jumlah		48	247,52	100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo

### 1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dengan jumlah yang besar tetapi kualitas yang baik akan lebih berguna dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara umum.

Hasil Sensus Penduduk 2021 (SP2021) menunjukkan bahwa penduduk Kota Palopo pada akhir 2021 tercatat sebanyak 187.331 jiwa, secara terinci menurut

jenis kelamin masing-masing 93.782 jiwa laki-laki dan 93.549 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 100,25 angka ini menunjukkan bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 100-101 penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 1,92 persen. Dengan demikian bila dibandingkan dengan luas wilayah 247,52 Km, maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 757 jiwa per kilometer persegi.

### Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah	Jiwa	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331
2	Laki-laki	Jiwa	85.967	87.812	89.917	92.444	93.782
3	Perempuan	Jiwa	90.940	92.866	94.697	92.237	93.549
4	Pertumbuhan	%	2,79	2,13	2,18	0,04	1,92
5	Densitas	Jiwa/Km	715	730	746	746,13	757
6	Sex Ratio	%	94,53	94,56	94,27	100,22	100,25

Sumber : BPS Kota Palopo

\* Data Tahun 2017-2020 merupakan hasil proyeksi penduduk  
 \* Data Tahun 2021 bersumber dari Hasil Sensus Penduduk 2021  
 Sumber Data : Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2021

Hasil SP 2021 Kota Palopo menunjukkan jumlah penduduk Kota Palopo sejumlah 187.331 jiwa penduduk, tercatat 4,79 persen penduduk lansia (65 tahun keatas), selebihnya sekitar 68,56 persen yang berada pada kelompok usia produktif (usia 15 – 64 tahun).



### 1.3.3 Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 %

dengan luas 76,677 Km<sup>2</sup> sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya, luas wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng Kota Palopo Menurut Kecamatan Tahun 2021**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Tingkat Kemiringan Lereng (Km <sup>2</sup> )			
			0-2 %	2-15 %	15-40 %	> 40 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	2,132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	<b>9,272</b>
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	<b>34,97</b>
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	<b>48,717</b>
<b>Jumlah</b>		<b>247,52</b>	<b>76,677</b>	<b>8,951</b>	<b>68,933</b>	<b>57,989</b>

Sumber : BPS Kota Palopo

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 m, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 m, dan sekitar 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1.000 m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



### Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Tingkat Ketinggian Daerah (Mdl)				
			0 – 25	26-100	101-500	501-1000	> 1000 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	-	2.132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9.272	-
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	13.450	<b>21.520</b>
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	35.184	<b>13.533</b>
<b>Jumlah</b>		<b>247,52</b>	<b>8,17</b>	<b>8,951</b>	<b>66,801</b>	<b>60.038</b>	<b>35.053</b>

Sumber : BPS Kota Palopo

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

#### 1.4 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PALOPO

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kota Palopo;
2. Sekretariat DPRD Kota Palopo;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Daerah (7 Badan) :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  4. Badan Pendapatan Daerah;
  5. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Dinas Daerah (29 Dinas) :
  1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  5. Dinas Sosial;
  6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  7. Dinas Tenaga Kerja;
  8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Dinas Perdagangan;
  10. Dinas Perindustrian;
  11. Dinas Kebudayaan;
  12. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  13. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  14. Dinas Pendidikan;
  15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  16. Dinas Perhubungan;
  17. Dinas Pertanahan;
  18. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
  19. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  20. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
  21. Dinas Ketahanan Pangan;
  22. Dinas Komunikasi & Informatika;
  23. Dinas Persandian & Statistik;
  24. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  25. Satuan Polisi Pamong Praja;
  26. Dinas Kearsipan;
  27. Dinas Perpustakaan;
  28. Dinas Transmigrasi;
  29. Dinas Perikanan
6. Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD 2) :
  1. RSUD Sawerigading
  2. RS dr. Palamai Tandi





#### 7. Kecamatan (9 Kecamatan) :

1. Kecamatan Wara;
2. Kecamatan Wara Utara;
3. Kecamatan Wara Selatan;
4. Kecamatan Wara Barat;
5. Kecamatan Wara Timur;
6. Kecamatan Bara;
7. Kecamatan Mungkajang;
8. Kecamatan Sendana;
9. Kecamatan Telluwanua;

#### 1.4.1 SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah. Jumlah Pegawai yang ada di Pemerintah Kota Palopo seluruhnya sebesar 4.311 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Instansi/Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Daerah	1	42	82	24	149
2	Sekretariat KPU	0	0	0	1	1
3	Sekretariat DPRD	1	12	16	7	36
4	RSUD Sawerigading	3	28	199	133	363
5	RS dr. Palammai Tandil	0	5	70	27	102
5	Inspektorat	0	3	26	14	43
6	Badan Daerah	0	41	149	32	222
7	Dinas Daerah	2	283	1724	876	2885
8	Kecamatan	0	24	101	9	134
9	Kelurahan	2	101	270	0	373
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>540</b>	<b>2.638</b>	<b>1.124</b>	<b>4.311</b>

*Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo*

## 1.5. SASARAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH



### S.1 MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

- Belum meratanya pemenuhan sarana prasarana serta SDM kependidikan dalam mendukung akses/partisipasi pada pendidikan dasar, pemenuhan layanan minimal pendidikan dasar, dan peningkatan kualitas pendidikan dasar.



### S.2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

- Belum meratanya pemenuhan sarana prasarana serta SDM kesehatan dalam mendukung akses masyarakat atas layanan kesehatan, pemenuhan pelayanan minimal kesehatan, pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat serta belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.



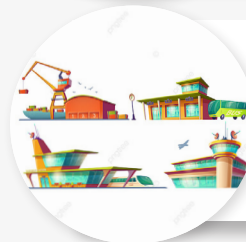
### S.3 MENINGKATNYA DERAJAT KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

- Stagnasi produksi dan produktivitas serta daya saing produk sektor perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja yakni pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta perikanan.
- Belum optimalnya perkembangan sektor perekonomian sekunder dan tersier terutama perdagangan, industri dan jasa perkotaan.
- Belum optimalnya perkembangan investasi dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk pada sektor ekonomi kreatif.
- Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja karena terbatasnya akses untuk meningkatkan keterampilan kerja dan etos kewirausahaan.



### S.4 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

- Terbatasnya kemampuan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Kurang berkembangnya kesadaran masyarakat atas penataan lingkungan permukiman dan perumahan.



### S.5 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR STRATEGIS

- Belum efektifnya penertiban penggunaan terminal dan pelabuhan



### S.6 MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

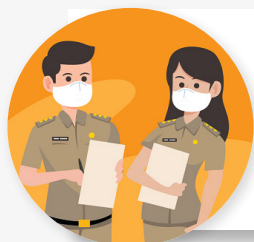
- Bertambahnya intensitas konversi lahan pertanian menjadi peruntukan non pertanian serta perambahan atas lokasi hutan.
- Adanya tekanan ekologi dan sosial pada kawasan pesisir akibat perluasan pemukiman dan perkembangan pusat aktivitas perekonomian.
- Kurang efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dalam RTRW.
- Adanya ancaman pencemaran air serta ketersediaan sustainabilitas pasokan sumber air bersih masyarakat
- Luas dan kualitas Lahan Terbuka Hijau dan ruang publik belum seimbang dengan pertumbuhan dan kebutuhan serta kondisi penduduk Kota Palopo.



## S.7

### MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- Sumber Daya Aparatur yang menyelenggarakan pemerintahan yang belum memadai
- Kualitas dan ketersediaan data dan informasi pembangunan serta Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) belum optimal, termasuk pada tingkat PD.
- Tingkat kesesuaian dan kualitas perencanaan kinerja tingkat kota dan PD masih lemah akibat asistensi, verifikasi dan sinkronisasi yang belum memadai.
- Kualitas dan transparansi atas proses pengadaan barang dan jasa serta keterbukaan informasi publik lainnya masih terbatas dan belum *massive*.



## S.8

### MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Belum seluruh Perangkat Daerah menerapkan SOP/SPM secara konsisten pada pelayanannya.
- Tidak tercukupinya kebutuhan sarana/ prasarana, fasilitas, alokasi pembiayaan dan SDM dalam penyelenggaraan SPM pelayanan dasar.
- Kualitas dan ketersediaan data kinerja SPM serta akuntabilitas kinerja pencapaian SPM pada perangkat daerah penyelenggara urusan masih lemah.



## S.9

### MENINGKATNYA PERLUASAN KESEMPATAN BERUSAHA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perniagaan
- Rendahnya minat masyarakat untuk berusaha disektor swasta
- Belum semua koperasi aktif untuk menumbuhkankembangan perekonomian masyarakat
- Lapangan kerja yang tersedia masih sangat terbatas dibandingkan jumlah angkatan kerja yang ada.
- Penyediaan Data dan Informasi bursa ketenagakerjaan masih sangat terbatas



## S.10

### MENINGKATNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS

- Pertumbuhan perekonomian masih di dominasi pada sektor konsumsi.
- Belum bergerakinya sektor jasa



## S.11

### MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM PEREKONOMIAN DAERAH

- Sangat minimnya promosi pariwisata yang dilaksanakan.
- Belum semua potensi dan produk ekonomi kreatif dapat di promosikan secara maksimal
- Potensi pariwisata belum di optimalkan pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kunjungan pariwisata.



## 1.5 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Sesuai perkembangan dan kondisi Kota Palopo sampai dengan Tahun 2021, beberapa isu strategis yang akan menjadi fokus penanganan Kota Palopo pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas pelayanan dasar,
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang *sustainable* dan penataan lingkungan yang memperhatikan aspek budaya,
3. Pemenuhan kebutuhan dan pola konsumsi pangan berkualitas,
4. Peningkatan nilai tambah, pengembangan sektor jasa, perdagangan dan industri rumah tangga,
5. Ketertiban dan kenyamanan daerah serta partisipasi masyarakat dalam pemilu,
6. Kinerja pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik berkualitas.

## 1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran umum Kota Palopo, dan Permasalahan dan Isu-isu Strategis

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo tahun 2021 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam rangka peningkatan kinerjanya.







## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program / kegiatan, didalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Kinerja Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta menyediakan ukuran keberhasilan/ kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, rencana kinerja yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalannya. Dengan visi, misi, dan

strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kota Palopo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 tahun (2018-2023). Rencana Kinerja Pemerintah Kota Palopo mencakup tujuan, sasaran, serta strategi untuk mencapai agenda dan sasaran.

RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam



bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

### 2.1.1. V i s i

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Palopo saat ini, serta mencermati peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun mendatang, maka Walikota dan Wakil Walikota merumuskan Visi Kota Palopo tahun 2018 – 2023 sebagaimana tertuang

**“Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023”**

pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

Pada visi tersebut terdapat 3 ( tiga ) kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Maju**, Palopo yang maju bermakna bahwa Kota ini bergerak kearah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

**Inovatif**, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu memberi solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan publik yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

**Berkelanjutan**, Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya lokal.

**Palopo maju, inovatif dan berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.**



### 2.1.2. M i s i

Sesuai dengan visi tersebut diatas dan sabagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;
5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

### 2.1.3. Tujuan ,Sasaran dan Indikator Kinerja

Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan, sasaran dan indikator pembangunan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Visi : <b>Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023</b>			
Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja
1	2		3
Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat ( T.1)		Indeks pembangunan manusia
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ( S.1)	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ( S.2 )	Indeks Kesehatan
		Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin
			PDRB per Kapita

1	2	3
Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks daya saing infrastruktur
		Persentase areal kawasan kumuh
		Indeks Layanan Jalan
		Luas kawasan terdampak banjir Persentase luas ruang terbuka hijau
Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan	Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)	Indeks reformasi birokrasi
		Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Level SPIP daerah
		Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB
		Tingkat pengangguran terbuka
		PDRB per kapita
Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)	Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB
		Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah



## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam tahun 2021 Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan 5 (lima) tujuan, 11 (sebelas) sasaran, dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang akan dicapai dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo.

Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
1		2	3	4
Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup masyarakat ( T.1)		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	78,4
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ( S.1)	Indeks Pendidikan	Poin	78.37
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ( S.2 )	Indeks Kesehatan	Poin	78.21
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin	Persen	6.57
		PDRB Per Kapita	Tahun	42
Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)		Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	85.9
	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan ( S.4)	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	1.61
	Meningkatnya konektifitas dan Aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan	Persen	67,95
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir	Ha	10
		Persentase luas ruang terbuka hijau	Persen	79,98

1		2	3	4
Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65
	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai	70
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Point	84
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)		Pertumbuhan PDRB	Persen	4,16
	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	9,03
	Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	PDRB per kapita	Juta/Thn	104,1
Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)		Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	Persen	8,78
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah ( S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	5
		Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	3,78

## 2.3. PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel dibawah ini :

URAIAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI	LEBIH/KURANG	% REALISASI
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>957.596.278.224,00</b>	<b>936.579.524.790,63</b>	<b>21.016.753.433,37</b>	<b>98</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>153.896.341.415,00</b>	<b>140.122.685.325,63</b>	<b>13.773.656.089,37</b>	<b>91,05</b>
Pajak Daerah	41.022.700.000,00	35.622.582.580,00	5.400.117.420,00	86,84
Retribusi Daerah	11.023.002.200,00	11.577.437.248,64	554.435.048,64	105,03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.684.839.685,00	7.799.016.092,00	114.176.407,00	101,49
Lain-lain PAD yang Sah	94.165.799.530,00	85.123.649.404,99	9.042.150.125,01	90,4
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>777.737.136.809,00</b>	<b>770.932.817.337,00</b>	<b>6.804.319.472,00</b>	<b>99,13</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	723.505.013.307,00	722.950.633.455,00	554.379.852,00	99,92
Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.232.123.502,00	47.982.183.882,00	6.249.939.620,00	88,48
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>25.962.800.000,00</b>	<b>25.524.022.128,00</b>	<b>438.777.872,00</b>	<b>98,31</b>
Pendapatan Hibah	5.172.000.000,00	5.203.692.128,00	31.692.128,00	100,61
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.790.800.000,00	20.320.330.000,00	470.470.000,00	97,74
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.001.572.261.730,00</b>	<b>935.516.433.083,12</b>	<b>66.055.828.646,88</b>	<b>93,4</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>768.633.962.391,00</b>	<b>728.761.290.249,19</b>	<b>39.872.672.141,81</b>	<b>94,81</b>
Belanja Pegawai	462.110.345.217,00	450.043.897.859,00	12.066.447.358,00	97,39
Belanja Barang & Jasa	292.869.315.688,00	268.519.482.150,68	24.349.833.537,32	91,69
Belanja Bunga	1.650.000.000,00	1.606.611.749,51	43.388.250,49	97,37
Belanja Hibah	9.773.378.490,00	6.385.683.490,00	3.387.695.000,00	65,34
Belanja Bantuan Sosial	2.230.922.996,00	2.205.615.000,00	25.307.996,00	98,87
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.938.299.339,00</b>	<b>206.755.142.833,93</b>	<b>24.183.156.505,07</b>	<b>89,53</b>
Belanja Tanah	4.150.000.000,00	3.637.550.405,00	512.449.595,00	87,65
Belanja Peralatan & Mesin	52.480.471.969,00	50.594.961.122,00	1.885.510.847,00	96,41
Belanja Gedung & Bangunan	142.341.417.583,00	122.402.791.826,93	19.938.625.756,07	85,99
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.329.861.249,00	28.544.485.957,00	1.785.375.292,00	94,11
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.636.548.538,00	1.575.353.523,00	61.195.015,00	96,26
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0</b>
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0	2.000.000.000,00	0
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>43.975.983.506,00</b>	<b>-1.063.091.707,51</b>	<b>45.039.075.213,51</b>	<b>-2,42</b>

Sumber data: BPKAD Kota Palopo Tahun 2021







### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah pengukuran akuntabilitas kinerja yang dapat diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pada akhir pelaksanaan rencana kerja tahunan dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan pada awal tahun. Pengukuran tersebut merupakan manifestasi simbolis dari komitmen akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Data kinerja dimaksud dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data. Kemudian capaian kerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja.

Adapun penanggungjawab data kinerja tiap – tiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	
Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat ( T.1)	Indeks Pembangunan Manusia	
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ( S.1)	Indeks Pendidikan (Poin)	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ( S.2 )	Indeks Kesehatan (Poin)	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin	Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas PP&KB, Dinas PPA, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, peternakan, perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, SatPolPP, Setda, Bappeda, BakesbangPol Linmas
		PDRB per Kapita (Juta/ Kapita/Thn) (ADHB)	DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi & UKM
Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan permukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks daya saing infrastruktur	
	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan ( S.4)	Persentase areal kawasan kumuh	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LH, Dinas Transmigrasi
	Meningkatnya konektifitas dan Aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir	Dinas PUPR, Dinas LH, Bappeda
		Persentase luas ruang terbuka hijau	Dinas PUPR, Dinas LH, Bappeda



1	2	3	
Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan	Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)	Indeks reformasi birokrasi	Inspektorat, Kominfo, BKPSDM, DPMTSP dan Bagian Organisasi
	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah	Setda, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, BK-PSDM, Dinas Persandian dan Statistik.
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Damkar, Sat Pol PP, DPMTSP, Dinas LH, Dinas PP&KB, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Pertanahan, Dinas Kearsipan, Setda, Balitbangda, Dinas Kominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, BakesbangPol, Kecamatan
Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB	
	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka	Dinas Tenaga Kerja, Dinas PPPA, DPMTSP
	Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	Produktifitas Total Daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

1	2	3	
Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)	Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah ( S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekraf,Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga,Dinas Perdagangan,Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan,Dinas PUPR
		Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekraf,Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga,Dinas Perdagangan,Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan,Dinas PUPR

### 3.1. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN 2021

Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Palopo dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Palopo tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan

jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2	76 % sd. 90 %	Tinggi
3	66 % sd. 75 %	Sedang
4	51 % sd. 65 %	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Indikator Kinerja Utama atau IKU Pemerintah Kota Palopo merupakan indikator kinerja yang menjadi *inti (core)* atas keberhasilan pembangunan di Kota Palopo. Indikator ini dipilih sebagai ukuran keberhasilan atas penanganan permasalahan pembangunan oleh Pemerintah Kota Palopo selama lima tahun ke depan sampai dengan 2023.

Sesuai Perubahan RPJMD periode 2018-2023, IKU Kota Palopo sebanyak 19 Indikator, yang merupakan ukuran keberhasilan atas 5 Tujuan dan 11 sasaran pembangunan daerah. IKU Kota Palopo 2018-2023 ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Walikota Palopo Nomor. 478/IX/Tahun 2021 Tentang Perubahan lampiran Keputusan Walikota Palopo Nomor : 398/IX/2019 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo.

Berikut adalah tabel capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019, sesuai sasaran, indikator sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja :



**Tabel 3.1.2**  
**Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Kota Palopo**  
**Tahun 2019**

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian Kinerja	Kategori Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6
<b>Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup masyarakat ( T.1)</b>	Indeks pembangunan manusia	78.4	78.38	99,97%	Sangat Tinggi
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat ( S.1)	Indeks Pendidikan (Poin)	78.37	78.38	100,01%	Sangat Tinggi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ( S.2 )	Indeks Kesehatan (Poin)	78.21	78.34	100,17%	Sangat Tinggi
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase penduduk miskin	6.57	8.14	80,71%	Tinggi
	PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	42	46,52	110,76%	Sangat Tinggi
<b>Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas (T.2)</b>	Indeks daya saing infrastruktur	85,9	86,36	100,54%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan ( S.4)	Persentase areal kawasan kumuh	1,61	1,09	147,70%	Sangat Tinggi
Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan	67.95	67,16	98,84%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup (S.6)	Luas kawasan terdampak banjir	10	15	66,67%	Sedang
	Persentase luas ruang terbuka hijau	79,98	80	100,02%	Sangat Tinggi

1	2	3	4	5	6
<b>Terwujudnya birokrasi profesional komprehensif dan melayani (T.3)</b>	Indeks reformasi birokrasi	65	50,33	77,43%	Tinggi
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah	70	60,03	85,75%	Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	84	84,73	100,87%	Tinggi
<b>Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)</b>	Pertumbuhan PDRB	4,16	5,41	130%	Sangat Tinggi
Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	Tingkat pengangguran terbuka	9,03	8,83	102,26%	Sangat Tinggi
Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	Produktifitas Total Daerah (Juta/ Tenaga Kerja)	104,1	102,6	98,53%	Sangat Tinggi
<b>Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing (T.5)</b>	Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	8,78	5,23	59, 57%	Rendah
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah ( S.11)	Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	5	0,31	6,20%	Sangat Rendah
	Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah	3,78	4,92	130,16%	Sangat Tinggi
<b>RATA RATA KINERJA CAPAIAN IKU</b>				<b>94,53%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Hasil analisis pencapaian kinerja terhadap 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama, diketahui bahwa :

- 13 indikator atau 68,42% pencapaian Kinerjanya Sangat Tinggi,
- 3 indikator atau 15,78% pencapaian Kinerjanya Tinggi,
- 1 indikator atau 5,26% pencapaian Kinerjanya Sedang,
- 1 indikator atau 5,26% pencapaian Kinerjanya Rendah.
- 1 indikator atau 5,26% pencapaiannya sangat rendah

Sesuai hasil pengukuran indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021, kinerja Pemerintah Kota Palopo berada pada angka 94,53% atau Sangat Tinggi. Kinerja tahun 2021 tersebut, Meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berada pada posisi 78,93% atau Tinggi. Peningkatan capaian kinerja pada tahun 2021 pada umumnya disebabkan oleh kondisi nasional Pandemi Covid-19 yang mulai berangsur normal.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang posisi pencapaian kinerja tahun 2021 Pemerintah Kota Palopo, apakah lebih baik ataukah belum lebih baik, berikut adalah tabel perkembangan sekaligus perbandingan capaian kinerja tahun 2021, terhadap capaian tahun sebelumnya dan posisinya terhadap target pada masa akhir kinerja RPJMD yakni tahun 2023.

**Tabel 3.1.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2019 Terhadap Capaian Tahun Lalu dan Target Akhir RPJMD (2023) Pemerintah Kota Palopo**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RPJMD 2023	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA S.D 2021 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023
1	2	3	4	5
Indeks pembangunan manusia	78,06	78,38	79,25	98,90
Indeks Pendidikan (Poin)	77,76	78,38	79,59	100,01
Indeks Kesehatan (Poin)	78,28	78,34	78,76	100,17
Persentase penduduk miskin	7,85	8,14	5,99	73,59
PDRB per Kapita (Juta/ Kapita/Thn) (ADHB)	42,61	46,52	44	105,73
Indeks daya saing infrastruktur	85,88	86,36	85,9	100,53
Persentase areal kawasan kumuh	1,53	1,09	1,53	140,36
Indeks Layanan Jalan (poin)	73,00	67,16	68,45	98,11
Luas kawasan terdampak banjir	54,95	15	2	13,33
Persentase luas ruang terbuka hijau	76,95	80	80,1	98,64
Indeks Reformasi Birokrasi	52,70	50,33	75	67,10
Nilai akuntabilitas pemerintahan daerah	52,43	60,03	80	75,03
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	83,06	84,73	86	98,52
Pertumbuhan PDRB	0,45	4,16	5,69	95,07



1	2	3	4	5
Tingkat pengangguran terbuka	10,37	9,03	8,07	109,4
Produktifitas Total Daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	94,39	104,1	115	90,43
Total Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	2,28	5,23	10,89	48,03
Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah	0,02	0,31	7	4,43
Kontribusi ekonomi kreatif terhadap pendapatan asli daerah	2,26	4,92	3,89	126,48

Dari table diatas menunjukkan bahwa jumlah Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yang capaian kinerjanya “Lebih Baik” dari capaian Tahun 2020 sebanyak 18 ( delapan belas ) indikator. Jumlah Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yang capaian kinerjanya “Belum Lebih Baik dari capaian Tahun 2020 sebanyak 1 ( satu ) indikator. Dan jumlah Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yang capaian kinerjanya “Melebihi” target akhir RPJMD Tahun 2023 sebanyak 8 ( delapan ) Indikator.

### 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN 2021

Tujuan pembangunan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) tujuan dengan 5 (lima) indikator tujuan. Hasil pengukuran capaian tujuan Pemerintah Kota Palopo 2021, hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2021**

No	Tujuan ke	Nilai Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	99,97	Sangat Tinggi
2	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	100,54	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)	77,43	Tinggi

No	Tujuan ke	Nilai Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
4	Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	130	Sangat Tinggi
5	Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)	59,57	Rendah
<b>TOTAL NILAI RATA-RATA TUJUAN DAN PREDIKAT KINERJA</b>		<b>93,5</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

**Tujuan I : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat( T.1 )**

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas diketahui bahwa capaian kinerja tujuan pembangunan daerah untuk tujuan 1(satu) sebesar **99,97%** atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**.

**Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator tujuan pembangunan yang pertama di Kota Palopo, sekaligus menjadi IKU pertama Kota Palopo. Berikut adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo Tahun 2021 :

**Tabel 3.2.2**  
**Capaian Kinerja Tujuan I**

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	78.4	78.38	99.97	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				99.97	Sangat Tinggi
<b>NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN I</b>				<b>99.97</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo Tahun 2021 berada pada 78.38 Poin, selisih 0.2 Poin dibawah target angka IPM Kota Palopo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang berada pada posisi 78.40 Poin. Artinya persentase tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja IPM Kota Palopo terhadap target yang diperjanjikan pada tahun 2021 berada pada posisi 99.97% atau dengan predikat kinerja sangat baik/sangat berhasil.

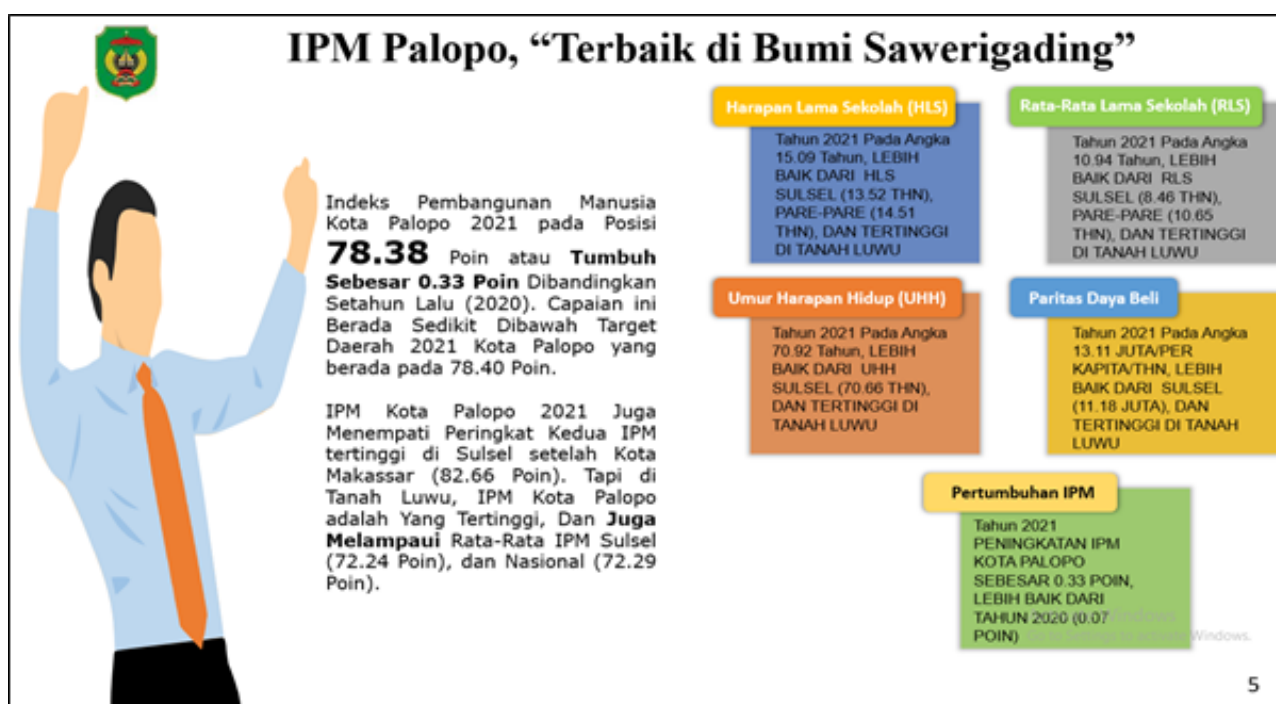
Angka IPM Kota Palopo 2021 juga lebih atau meningkat dibandingkan tahun 2020 (78.06 Poin) dan 2019 (77.98 Poin). Pertumbuhan IPM Kota Palopo Tahun 2021 berada pada posisi 0.42 persen dibandingkan angka IPM Tahun 2020

Capaian kinerja IPM 2021, berselisih tipis dengan target IPM tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir dalam RPJMD periode 2018-2023 yang berada pada angka 79.25 Poin, sehingga pada tahun 2021, telah mencapai posisi 98.90% terhadap target akhir IPM Kota Palopo tahun akhir dalam periode RPJMD 2018-2023.

**Tabel 3.2.3**  
**Capaian IPM 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR RPJMD 2023	% CAPAIAN KINERJA S.D 2021 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	78.06	78.38	79.25	98.90

Dengan angka IPM tersebut, menempatkan IPM Kota Palopo sebagai peringkat kedua IPM tertinggi dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel, dibawah Kota Makassar, tapi berada diatas IPM satu Kota Lainnya yang ada di Sulsel yakni Kota Pare-Pare yang tahun 2021 IPM-nya berada pada angka 78.21 Poin. Di tanah Luwu, terhadap empat wilayah otonom lainnya, IPM Kota Palopo 2021 adalah tertinggi dibandingkan Kabupaten Luwu 2021 (70.85 Poin), Kabupaten Luwu Utara (70.02 Poin), kabupaten Luwu Timur (73.34 Poin). IPM Kota Palopo 2021 juga berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 (72.24 Poin) dan nasional yang berada pada angka 72.29 Poin





Berikut adalah table perkembangan IPM Kota Palopo dalam tiga tahun terakhir :

**Tabel Perkembangan IPM Kota Palopo  
Tahun 2019-2021**

Prov/Kab/Kota di Sulsel	IPM		
	2019	2020	2021
SULAWESI SELATAN	71.66	71.93	72.24
Luwu	70.39	70.51	70.85
Tana Toraja	68.25	68.75	69.49
Luwu Utara	69.46	69.57	70.02
Luwu Timur	72.8	73.22	73.34
Toraja Utara	69.23	69.33	69.75
Kota Makasar	82.25	82.25	82.66
Kota Pare Pare	77.62	77.86	78.21
Kota Palopo	77.98	78.06	78.38
Nasional	71.92	71.94	72.29

Sumber : Badan Pusat Statistik

Beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka IPM Kota Palopo adalah sebagai berikut :

- Paritas daya beli atau pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kota Palopo meningkat dalam tiga tahun terakhir, Jika 2019 pada angka 12,986 juta/kapita/tahun, tahun 2021 menjadi 13,11 juta/kapita/tahun. Kondisi ini menempatkan daya beli masyarakat Kota Palopo berada diatas daya beli rata-rata masyarakat Sulsel yakni 11,18 juta. kapita/tahun.
- Indeks Pengeluaran masyarakat Kota Palopo juga meningkat dari 78.12 Poin pada tahun 2019 menjadi 78.43 poin tahun 2021, berada diatas indeks pengeluaran rata-rata masyarakat Sulsel yang berada pada 73.56 poin.

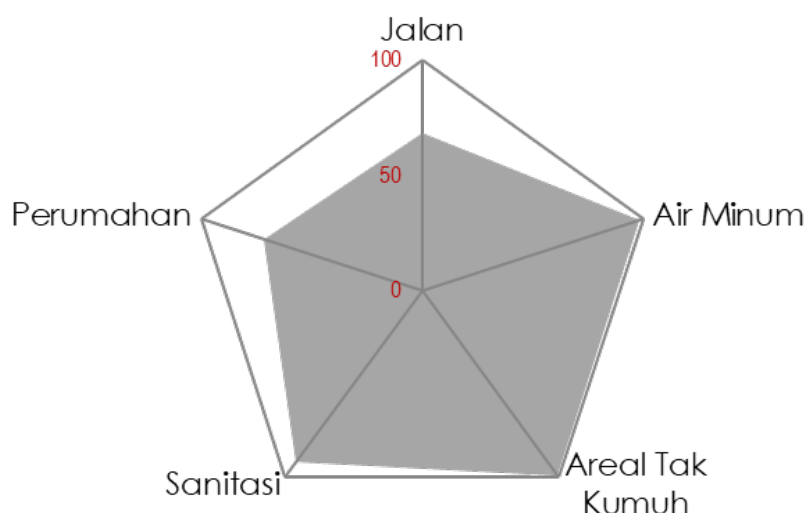
Berikut adalah perkembangan daya beli dan indeks pengeluaran masyarakat Kota palopo dalam tiga tahun terakhir dan perbandingan dengan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel  
Perkembangan dan Perbandingan  
Daya Beli dan Indeks Pengeluaran Kota Palopo  
2019-2021**

Prov/Kab/Kota	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan			Indeks Pengeluaran		
	Paritas Daya Beli (PPP)					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>11,118</b>	<b>11,079</b>	<b>11,184</b>	<b>73.37</b>	<b>73.27</b>	<b>73.56</b>
Luwu	10,085	10,014	10,116	70.39	70.18	70.49
Tana Toraja	7,253	7,217	7,434	60.32	60.17	61.07
Luwu Utara	11,583	11,562	11,736	74.63	74.57	75.03
Luwu Timur	12,802	12,814	12,886	77.68	77.71	77.88
Toraja Utara	8,083	8,097	8,134	63.63	63.69	63.82
Kota Makasar	16,989	16,873	17,097	86.33	86.12	86.52
Kota Pare Pare	13,648	13,663	13,786	79.64	79.67	79.95
<b>Kota Palopo</b>	<b>12,986</b>	<b>12,995</b>	<b>13,117</b>	<b>78.12</b>	<b>78.14</b>	<b>78.43</b>

## Tujuan II : Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)

Indeks daya saing infrastruktur adalah indikator yang memperlihatkan kemantapan infrastruktur dasar yang terdiri atas kualitas jalan, akses air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan pemilikan rumah. Tiap indikator memiliki bobot yang sama dan indeks didapatkan melalui rerata dari nilai setiap indikator tersebut. **Semakin penuh spiderweb** yang dibentuk (gambar di bawah), maka semakin berdayasaing infrastruktur suatu wilayah pada aspek yang diukur.



**Tabel 3.2.4**  
**Capaian Kinerja Tujuan II**

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks Daya Saing Infrastruktur	85,9	86,36	100,53	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100,53	Sangat Tinggi
<b>NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN II</b>				<b>100,53</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Indeks Daya Saing Infrastruktur Kota Palopo 2021 yaitu 86,36, capaian ini melampaui target tahun 2020 yaitu 85,88 bahkan capaian ini telah melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 85,9.

**Tabel 3.2.5**  
**Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan II**

INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA S.D 2021 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
1	Daya Saing Infrastruktur	85,88	86,36	85,9	100,53

**Tujuan III : Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani ( T.3 )**

Berdasarkan tabel 3.2.1 diketahui bahwa capaian kinerja tujuan pembangunan daerah untuk tujuan ke 3 (tiga) sebesar **77,43** atau memiliki predikat **Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan rata-rata kelompok, pada tujuan ketiga nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian tujuan, sebab tujuan ketiga hanya memiliki 1(satu) IKU.

**Tabel 3.2.6**  
**Capaian Kinerja Tujuan III**

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Terwujudnya Birokrasi Profesional kompetitif dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	65	50,33	77,43	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				77,43	Tinggi
<b>NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT TUJUAN III</b>				<b>77,43</b>	<b>Tinggi</b>

Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 sampai saat laporan ini disusun, belum dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeran Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sehingga untuk kebutuhan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih menggunakan indeks reformasi birokrasi tahun 2020, yaitu sebesar 50,33 atau kategori CC. Capaian ini belum memenuhi target tahun 2021 yaitu 65 dan masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 72. Sehingga capaian kinerja indikator terhadap target akhir RPJMD adalah 69,90%.



**Tabel 3.2.7**  
**Capaian Kinerja Indikator Tujuan Pembangunan III**

INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN KINERJA S.D 2021 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD 2023 (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	52,70	50,33	75	67,10

**Tujuan IV ; Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4) dengan Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (LPE) Kota Palopo adalah indikator tujuan pembangunan daerah yang ke empat pembangunan Kota Palopo periode 2018-2023. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi/PDRB (LPE) Kota Palopo berada pada angka 5.41% (BPS Kota Palopo Tahun 2022).

Angka atau capaian ini melampaui target daerah 2021 (4.16%), sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini terhadap target 2021, adalah 130% dengan predikat kinerja sangat baik. Angka Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2021 juga lebih tinggi/lebih baik dari tahun 2020 (0.45%) namun masih dibawah angka LPE 2019 (6.75%).

Kemudian terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 (5.69%), tingkat capaian kinerja LPE Tahun 2021 berada pada angka 95.08%. Tiga Kontributor Terbesar LPE Kota Palopo Perdagangan Besar & Eceran (24.04%), Pertanian, Kehutanan, Perikanan (17.14), Konstruksi (16.69%).

Berikut adalah table capaian LPE Kota Palopo tiga tahun terakhir :

Tujuan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021					Terhadap RPJMD	
		2019	2020	Target Kinerja Tahun	Realisasi Kinerja Tahun	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Laju Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	6.75	0.45	4.16	5.41	130	5.69	95.08
<b>Rata-Rata Kinerja Indikator Tujuan IV Tahun 2021</b>						<b>130</b>		



Pemerintah Kota Palopo telah mengambil sejumlah langkah penting dan strategis dalam pemulihan ekonomi Kota Palopo pada tahun 2021, yang hasilnya pada tahun 2021 terbukti mampu menempatkan Kota Palopo sebagai Kota Paling Produktif diantara 2 Kota Lainnya di Sulsel yakni Kota Makassar dan Kota Pare-Pare. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Palopo Tahun 2021 (5.41%), jauh melebihi atau lebih baik dari angka LPE Makassar 2021 (4.47%) dan Pare-Pare (4.41%), juga melampaui atau lebih baik dari angka LPE Provinsi Sulsel (4.65%) dan Nasional (3.69%). LPE Kota Palopo juga berada diatas LPE 2 Kabupaten di Bumi Lakipadada (Kabupaten Toraja & Toraja Utara), yang berada disebelah Barat Kota Palopo. Nilai PDRB (ADHB) Kota Palopo juga memberi *Share* Sebesar 1.60% Bagi PDRB (ADHB) Sulawesi Selatan, Lebih Tinggi/lebih besar dibandingkan *Share* Kota Pare-Pare (1.43%)



## 2021, Palopo Jadi Kota Paling “Produktif”

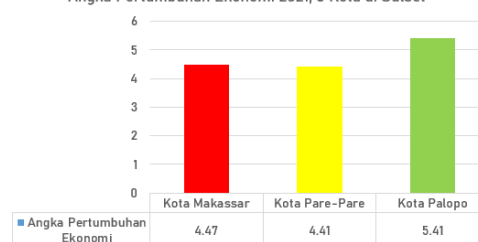
Tahun 2021, Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Palopo adalah yang Tertinggi dari 3 Kota Di Sulawesi Selatan. Berada diatas LPE di 2 Kabupaten di Bumi Lakipadada (Toraja & Toraja Utara), Bahkan Berada diatas LPE Sulsel

Di “Bumi Sawerigading” Hanya Luwu yang LPE-nya Berada Diatas LPE Kota Palopo,

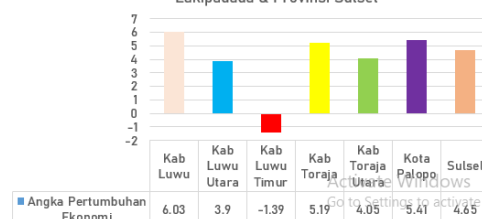
Nilai PDRB (ADHB) Palopo Memberi *Share* Sebesar 1.60% Bagi PDRB (ADHB) Sulawesi Selatan, Lebih Tinggi Dibandingkan *Share* Kota Pare-Pare (1.43%)

**Tiga Kontributor Terbesar LPE Kota Palopo**  
Perdagangan Besar & Eceran (24.04%), Pertanian, Kehutanan, Perikanan (17.14%), Konstruksi (16.69%)

Angka Pertumbuhan Ekonomi 2021, 3 Kota di Sulsel



Angka Pertumbuhan Ekonomi 2021 di Bumi Sawerigading, Lakipadada & Provinsi Sulsel



Di jazirah Luwu atau dalam konteks regional, yang terdiri dari tiga kabupaten dan satu kota, hanya Kabupaten Luwu yang LPE melampaui LPE Kota Palopo sebab Luwu Timur hanya pada posisi (-1.39%), Luwu Utara (3.9%), sementara Luwu (6.03%).

### **Faktor yang mempengaruhi :**

**Pertumbuhan ekonomi dan sejumlah indikator makro kesejahteraan** masyarakat dalam tiga tahun terakhir (2019 ke 2020) memang mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan pembatasan social berskala besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan Pemerintah sebagai upaya merespon pandemic covid 19. Tahun 2020 angka LPE Kota Palopo hanya berada di 0.45%, tahun 2021, angka LPE mampu ditingkatkan.

Sejumlah langkah strategis yang diambil Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 dalam memulihkan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Menekan dan menjaga kestabilan tingkat inflasi dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga daya beli tetap terjaga, disamping menjaga ketersediaan dan keterjangkauan logistic daerah terutama pangan tetap berjalan normal.
2. Memantapkan upaya perlindungan, pemberdayaan, penguatan dan pendampingan masyarakat miskin dan kelompok minoritas lain melalui sinergi dan berbagai program penangan yang lebih terfokus
3. Menekan jumlah dan persentase penangguran terbuka dengan meningkatkan skil dan kompetensi tenaga kerja, kualitas dan daya saing investasi daerah dan peningkatan akses dan kualitas tenaga kerja

Implementasi atas serangkaian sejumlah kebijakan strategis diatas adalah sebagai berikut :

- Menjaga dan mengoptimalisasi produksi dan produktifitas daerah, dan menjaga ketahanan pangan daerah
- Mengoptimalisasi bantuan-bantuan usaha kepada kelompok usaha masyarakat
- Memastikan bahwa seluruh aktifitas lapangan usaha kembali berjalan sesuai scenario *new normal* dengan protokol kesehatan
- Memperluas cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis *life skill* dan fasilitasi akses pada lapangan berusaha
- Memastikan proyek proyek infrastruktur padat karya yang bersumber dari dana kelurahan mengakomodir tenaga kerja local masyarakat.
- Memastikan infrastruktur yang menunjang perekonomian mampu diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal
- Memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dijalankan perangkat daerah secara integratif dan bersinergi
- Mengoptimalkan peran dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakselerasi ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah



**Perkembangan Capaian Nilai  
PDRB Kota Palopo (ADHB & ADHK)  
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2021**

No	Bidang /Urusan	PDRB ADHB Tahun			PDRB ADHK Tahun		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,301.47	1,352.04	1,493.21	871,74	884.51	923.60
2	Pertambangan & Penggalian	12.39	12.55	13.43	6,82	6.76	7.16
3	Industri Pengolahan	216.26	205.18	216.58	139,20	130.85	134.79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.05	6.18	6.46	5,89	6.1	6.37
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13.55	13.61	13.85	15,42	15.42	15.40
6	Konstruksi	1,330.13	1,325.43	1454.37	779,14	774.84	816.75
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,938.86	1,963.95	2095.14	1.421,61	1,426.60	1491.21
8	Transportasi dan Pergudangan	475.89	409.35	485.29	312,34	268.07	304.64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	93.72	87.5	94.27	64,55	60.02	64.27
10	Informasi dan Komunikasi	335.27	374.82	388.18	335,22	376.6	387.66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	579.66	593.39	671.08	382,09	391.48	423.52
12	Real Estat	384.06	403.01	414.50	246,38	258.25	265.22
13	Jasa Perusahaan	7.52	7.46	7.82	5,07	4.97	5.14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	616.97	624.2	666.24	380,14	377.91	399.87
15	Jasa Pendidikan	342.26	349.4	359.18	262,10	265.76	272.25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	184.63	193.41	223.66	145,79	150.56	172.78
17	Jasa Lainnya	103.82	103.81	111.04	73,88	73.37	77.63
	<b>PDRB ADHB</b>	<b>7,942.48</b>	<b>8,025.29</b>	<b>8714.31</b>	<b>5.447,36</b>	<b>5,472.08</b>	<b>5768.28</b>

**Tujuan V : Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5) dengan Indikator Tujuan Total Kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PAD**

Angka Total Kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PAD (%) Kota Palopo Tahun 2021 berada pada posisi 5.23%. Angka ini masih berada dibawah atau belum mencapai target kinerja 2021 yakni 8.78%. Artinya persentase realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2021 hanya pada posisi 59.57% atau dengan predikat kinerja kurang berhasil. Terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023, kondisi 2021 baru berhasil merealisasikan target RPJMD sebesar 48.03%.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian Kontribusi Pendapatan Asli

daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PAD Tahun 2021, sebenarnya lebih meningkat atau sudah lebih baik dibandingkan angka capaian kinerja tahun 2020 yang hanya berada pada posisi 2.28%. Namun belum sama, dengan angka capaian yang pernah diraih Kota Palopo tahun 2019 sebesar 8.88%.

Berikut adalah gambaran capaian Kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PAD dalam tiga tahun terakhir dan perbandingannya terhadap target akhir RPJMD Kota Palopo Tahun 2023 :

Tujuan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021			Terhadap RPJMD	
		2019	2020	Target Kinerja Tahun	Realisasi Kinerja Tahun	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
<b>Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)</b>	Total Kontribusi PAD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PAD (%)	8.88	2.28	8.78	5.23	59.57	10.89	48.03
<b>Rata-Rata Kinerja Indikator Tujuan V Tahun 2021</b>						<b>59.57</b>		

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo dari sector pariwisata Tahun 2021 berada pada angka Rp. 434.380.324 sementara PAD dari sector ekonomi kreatif sebesar Rp. 6.894. 036.118,- sehingga total PAD terhadap dari sector pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Palopo Tahun 2021 pada angka Rp. 7.324. 530.315,-.

Total Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo sendiri pada tahun 2021, senilai Rp. 140.122. 685.326,- sehingga kontribusi/share PAD sector pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap total seluruh Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo Tahun 2021 hanya sebesar 5.23%. Capaian kinerja ini masih berada dibawah target Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021, dimana sector pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan mampu memberi kontribusi atau share sebanyak 8.78%.

Bila dibandingkan tahun 2020, nilai PAD sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Palopo

pada tahun 2021 yang berada pada angka Rp. 7.324.530.315,-, meningkat atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dimana angka PAD dari sector pariwisata dan ekraf berada pada nominal Rp. 6.428.266.808,- , tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka Rp. 8.561.179.405,-.

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
PAD Sektor Pariwisata & Ekonomi Kreatif	8,561,179,405	6,428,266,808	7,324,530,315
Total PAD	164,812,192,980.08	221,552,741,601.65	140,122,685,326.17
<b>Persentase</b>	<b>5.19</b>	<b>2.90</b>	<b>5.23</b>

Berikut adalah beberapa indikator kinerja yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Palopo pada tahun 2021 :

Indikator	Realisasi 2020	Tahun 2021		% Realisasi
		Target	Realisasi	
Kunjungan Wisata (%)	53.28	100	56.82	56.82
Lama Kunjungan Wisata ( Rata - rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun )	1.04	2.5	1.10	44
PAD Sektor Pariwisata (%)	2.90	5	5.23	104.6
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke kabupaten / kota	2	2	2	100
Tingkat hunian akomodasi (%)	22.70	32	30.38	94.94
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Palopo (Harga Berlaku)	0.080	1.24	0.084	6.77
Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap PAD (%)	2.90	5	5.23	104.6
Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PAD (%)	2.72	3.78	4.92	130.159



### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021

Sasaran pembangunan Kota Palopo sebanyak 11(sebelas) sasaran dengan 14 (empat belas) indicator sasaran. Hasil pengukuran capaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Palopo 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah**  
**Kota Palopo Tahun 2021**

No	Sasaran ke	Nilai Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	100,01	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	100,17	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	95,74	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	147,70	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	98,84	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup (S.6)	83,34	Tinggi
7	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	85,75	Tinggi
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	100,87	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja (S.9)	102,26	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya produksi dan produktivitas (S.10)	98,5	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	68,18	Sedang
<b>TOTAL NILAI RATA-RATA SASARAN DAN PREDIKAT KINERJA</b>		<b>98,30</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

**Sasaran I ; Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1) dengan Indikator Sasaran adalah : Indeks Pendidikan**

Angka Indeks Pendidikan Kota Palopo Tahun 2021 berada pada posisi 78.38 poin, berada diatas atau melebihi target 2021 Kota Palopo 78.37, sehingga persentase tingkat capaian kinerja indicator indeks pendidikan pada tahun 2021 berada pada angka 100.01 persen dengan predikat kinerja **sangat berhasil**. Indeks Pendidikan Kota Palopo tahun 2021, angkanya juga meningkat atau lebih tinggi dari angka indeks pendidikan 2020 yang berada pada posisi 77.76 poin dan 2019 yang berada pada angka 77.79 poin.

**Tabel 3.3.2**  
**Capaian Kinerja Indikator Sasaran I**

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya-Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	78.37	78.38	100.01	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100.01	Sangat Berhasil
<b>NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN I</b>				<b>100.01</b>	<b>Sangat Berhasil</b>

Capaian Indeks Pendidikan Kota Palopo Tahun 2021 ini juga hanya berselisih tipis dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 yang pada tahun 2023 menargetkan angka Indeks Pendidikan sebesar 78.79 Poin, atau sampai dengan tahun 2021, pemenuhan target Indeks Pendidikan Kota palopo terhadap target tahun akhir RPJMD Kota Palopo telah berada pada angka 99.73%.

**Tabel 3.3.3**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Kota Palopo 2021**

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2021	Realisasi 2021			
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat(S.1)	Indeks Pendidikan (Poin)	77.76	78.37	78.38	100.01	78.59	99.73

Posisi Indeks Pendidikan Palopo Tahun 2021 berada jauh diatas Indeks Pendidikan Sulawesi Selatan (65.76 Poin), juga diatas Kota Pare-Pare (75.81), dan tiga kabupaten lain di Tanah Luwu yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo yakni Luwu Utara (61.12 Poin), Luwu Timur (65.03 Poin) dan Kabupaten Luwu (65.03 Poin). Di Sulawesi Selatan hanya Kota Makassar yang Indeks Pendidikannya berada diatas Indeks Pendidikan Kota Palopo yakni berada pada angka 81.38 Poin. Berikut adalah table perbandingan dan perkembangan Indeks Pendidikan beberapa wilayah di Sulsel terhadap Indeks Pendidikan Kota Palopo dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 3.3.4**  
**Perkembangan dan Perbandingan Indeks Pendidikan**  
**Kota Palopo dan beberapa wilayah di Sulsel Tahun 2019-2021**

Prov/Kab/Kota	Indek Pendidikan		
	2019	2020	2021
SULAWESI SELATAN	64.64	65.29	65.76
Luwu	64.17	64.49	65.03
Tana Toraja	64.46	65.87	66.87
Luwu Utara	60.43	60.49	61.12
Luwu Timur	64.08	64.97	65.03
Toraja Utara	63.54	63.7	64.69
Kota Makasar	80.56	80.62	81.38
Kota Pare Pare	74.58	75.11	75.81
Kota Palopo	77.69	77.76	78.38

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Meningkatnya angka indeks pendidikan Kota Palopo ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Palopo Tahun 2021.

Dua indicator yang menjadi ukuran kemajuan pendidikan ini, angkanya juga bergerak naik, lebih baik dari tahun –tahun sebelumnya. Berikut adalah gambaran perkembangan harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama sekolah masyarakat Kota Palopo tiga tahun terakhir dan komparasinya dengan beberapa wilayah disekitar Kota Palopo atau yang setara lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel Perkembangan HLS dan RLS Kota Palopo dan Wilayah Lain**  
**Tahun 2019-2021**

Prov/Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah			Rata-rata Lama Sekolah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
SULAWESI SELATAN	13.36	13.45	13.52	8.26	8.38	8.46
Luwu	13.32	13.33	13.39	8.15	8.24	8.35
Tana Toraja	13.58	13.8	13.86	8.02	8.26	8.51
Luwu Utara	12.42	12.43	12.57	7.78	7.79	7.86
Luwu Timur	12.82	12.83	12.84	8.54	8.8	8.81
Toraja Utara	13.37	13.38	13.39	7.92	7.96	8.25
Kota Makasar	15.56	15.57	15.58	11.2	11.21	11.43
Kota Pare Pare	14.49	14.5	14.51	10.3	10.45	10.65
Kota Palopo	15.07	15.08	15.09	10.75	10.76	10.94

*Sumber : Badan Pusat Statistik*



Tabel diatas menunjukkan bahwa angka HLS Kota Palopo bergerak naik dalam tiga tahun terakhir, dari 15.07 Tahun (2019) menjadi 15.09 Tahun (2021). Demikian halnya dengan angka RLS, yang naik dari 10.75 Tahun (2019) menjadi 10.94 Tahun (2021). Ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pendidikan masyarakat Kota Palopo dari tahun ke tahun.

Angka HLS Kota Palopo 2021 di Provinsi Sulsel juga hanya kalah dari HLS Kota Makassar (15.58 Tahun), dan posisi HLS Kota Palopo, lebih baik atau diatas angka HLS Provinsi Sulsel yang berada pada angka 13.52 Tahun. Bahkan di Tanah Luwu, terhadap empat wilayah, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, HLS kota Palopo adalah yang tertinggi, dan berada diatas HLS Kota Pare-Pare (14.51 Tahun).

Pada angka RLS, Kota Palopo bergerak naik atau lebih baik dari tahun ke tahun. 2019 hanya pada angka 10.75 Tahun, dan 2021 meningkat menjadi 10.94 Tahun. RLS Kota Palopo 2021 bahkan melampaui rata-rata RLS Sulsel (8.46 Tahun), Kota Pare-Pare (10.65 Tahun) dan RLS Palopo menjadi yang tertinggi di Tanah Luwu (Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur).

Peningkatan derajat pendidikan masyarakat Kota Palopo juga ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi dalam bidang pendidikan. Berikut adalah perkembangan angka partisipasi pendidikan di Kota Palopo tahun 2019-2021 :

**Tabel**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan**  
**Kota Palopo 2019-2023**

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun		
		2019	2020	2021
I	Angka Partisipasi Kasar			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	105.99	104.62	105.2
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	86.02	87.87	89.43
II	Angka Partisipasi Murni			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99.44	99.01	98.81
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	78.11	78.33	80.37
III	Angka partisipasi sekolah (%)			
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	997	995.3	993
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	991.7	986.9	986.3

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo untuk memastikan bahwa sasaran pertama ini bisa dicapai adalah :

- Memastikan tidak ada peserta didik pendidikan dasar yang putus sekolah karena persoalan keterbatasan biaya melalui pelaksanaan program pendidikan gratis.
- Menyediakan seragam dan peralatan sekolah secara cuma-cuma (gratis) bagi seluruh peserta didik, yang baru tamat dan akan melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya, dan masih menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo.
- Memastikan bahwa semua sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palopo, mengelola dana BOS Pendidikannya secara baik dan benar, sehingga mampu meringankan beban biaya atas pendidikan masyarakat.
- Memastikan bahwa upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, baik pada ting-

kat pendidikan anak usia dini (PAUD), SD dan SMP dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dengan system kolaborasi. Misalnya mengembangkan sarana jalan (oleh Dinas PU) dan meningkatkan kelancaran/ketersediaan transportasi angkutan umum/public (oleh Dishub) yang lebih optimal dari dan menuju lokasi sarana pendidikan. Termasuk pembinaan sejumlah lembaga pendidikan dasar yayasan yang ada di Kota Palopo.

**Tabel 3.3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 dan Kinerja Keuangan**

Tahun	Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)	Anggaran
2021	101.01	89.57%	192,310,873,085
2020	103.56	98.67%	35,979,030,828
2019	103.76	98.06%	46,490,466,560

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021 mengalokasikan belanja sebesar Rp. **214,712,441,351** yang dikelola oleh dua perangkat daerah yakni Dinas Pendidikan dan dinas Perpustakaan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **192,310,873,085** atau 89.57%. Artinya realisasi kinerja yang bisa dicapai Pemerintah Kota Palopo masih lebih besar, daripada realisasi keuangan.

Sebab kinerja sasaran pertama berada pada angka 101.01% sementara realisasi keuangan hanya pada angka 89.57%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo mampu mengimplementasikan bahwa pengelolaan keuangan harus mampu membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dalam hal ini peningkatan indeks pendidikan. Berikut adalah program dan realiasi keuangan pada sasaran pembangunan pertama tahun 2021 :

**Tabel**  
**Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 1**

Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	58,772,218,975	43,335,653,669	73.73
Program Pendidik dan Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan	55,802,500	55,721,500	99.85
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pendidikan	153,228,328,276	146,305,146,614	95.48
Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	82,595,000	82,395,000	99.76
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perpustakaan	2,573,496,600	2,531,956,302	98.39
<b>Kinerja Anggaran</b>		<b>214,712,441,351</b>	<b>192,310,873,085</b>	<b>89.57</b>

## Sasaran II : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2) dengan Indikator Sasaran Indeks Kesehatan Masyarakat

### Indeks Kesehatan Kota Palopo

Angka Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Palopo Tahun 2021 berada pada posisi 78.34 poin, berada diatas atau melebihi target 2021 Kota Palopo 78.21, sehingga persentase tingkat capaian kinerja indicator indeks pendidikan pada tahun 2021 berada pada angka 100.17 persen dengan predikat kinerja **sangat berhasil**. Indeks Kesehatan Kota Palopo tahun 2021, angkanya juga meningkat atau lebih tinggi dari angka indeks kesehatan 2020 yang berada pada posisi 78.28 poin dan 2019 yang berada pada angka 78.14 poin

**Tabel 3.3.6**  
**Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2**

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET 2021	REALISASI 2021		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Indeks Kesehatan (Poin)	78.21	78.34	100.17	Sangat Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100.17	Sangat Berhasil
<b>NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN II</b>				<b>100.17</b>	<b>Sangat Berhasil</b>

Capaian Indeks Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021 ini juga hanya berselisih tipis dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 yang pada tahun 2023 menargetkan angka Indeks Kesehatan sebesar 78.76 Poin. Sehingga sampai dengan tahun 2021, pemenuhan target Indeks Kesehatan Kota Palopo terhadap target tahun akhir RPJMD Kota Palopo telah berada pada angka 99.46%.

**Tabel 3.3.3**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Kota Palopo 2021**

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Tahun		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target 2021	Realisasi 2021			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat(S.1)	Indeks Kesehatan (Poin)	78.28	78.21	78.34	100.17	78.76	99.46



Posisi Indeks Kesehatan Palopo Tahun 2021 berada jauh diatas Indeks Pendidikan Sulawesi Selatan (77.94 Poin), tapi masih terpaut tipis dibawah Kota Pare-Pare (78.94). Namun terhadap tiga kabupaten lain di Tanah Luwu yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo yakni Luwu Utara (74.88 Poin), Luwu Timur (77.89 Poin) dan Kabupaten Luwu (77.60 Poin), Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Palopo jauh lebih kompetitif.

Dari 23 Kabupaten/Kota di Sulsel, selain Kota Pare-Pare, Kota Makassar serta Kabupaten Tana Toraja, Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Palopo masih lebih baik/tinggi. Berikut adalah table perbandingan dan perkembangan Indeks Kesehatan beberapa wilayah di Sulsel terhadap Indeks Kesehatan Kota Palopo dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 3.3.5**  
**Perkembangan dan Perbandingan Indeks Kesehatan**  
**Kota Palopo dan beberapa wilayah di Sulsel Tahun 2019-2021**

Prov/Kab/Kota	Indeks Kesehatan		
	2019	2020	2021
SULAWESI SELATAN	77.58	77.8	77.94
Luwu	77.22	77.45	77.6
Tana Toraja	81.77	82	82.15
Luwu Utara	74.32	74.63	74.88
Luwu Timur	77.51	77.74	77.89
Toraja Utara	82.08	82.14	82.17
Kota Makasar	80	80.14	80.2
Kota Pare Pare	78.74	78.88	78.94
<b>Kota Palopo</b>	<b>78.14</b>	<b>78.28</b>	<b>78.34</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

**Peningkatan Indeks Kesehatan masyarakat Kota Palopo tahun 2021** sangat dipengaruhi oleh peningkatan angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kota Palopo Tahun 2021. Angka AHH yang menjadi ukuran kemajuan pembangunan kesehatan, juga bergerak naik, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah gambaran perkembangan Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Palopo tiga tahun terakhir dan komparasinya dengan beberapa wilayah disekitar Kota Palopo atau yang setara lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Palopo**  
**dan Wilayah Lain Tahun 2019-2021**

Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH)		
	2019	2020	2021
SULAWESI SELATAN	70.43	70.57	70.66
Luwu	70.19	70.34	70.44
Tana Toraja	73.15	73.3	73.4
Luwu Utara	68.31	68.51	68.67
Luwu Timur	70.38	70.53	70.63
Toraja Utara	73.35	73.39	73.41
Kota Makasar	72	72.09	72.13
Kota Pare Pare	71.18	71.27	71.31
<b>Kota Palopo</b>	<b>70.79</b>	<b>70.88</b>	<b>70.92</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka AHH Kota Palopo bergerak naik dalam tiga tahun terakhir, dari 17.79 Tahun (2019) menjadi 70.92 Tahun (2021). Peninkatan angka ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Kota Palopo dari tahun ke tahun.

Angka AHH Kota Palopo 2021 masih lebih tinggi atau lebih baik dari AHH Provinsi Sulsel 2021 yang berada pada angka 70.66 tahun. Juga lebih baik dari kabupaten yang berbatasan dengan Kota Palopo yakni luwu (70.44 Tahun), Luwu Utara (68.67 Tahun). Meski demikian, AHH Kota Palopo masih berada dibawah AHH dua Kota lain di Sulsel yakni Makassar dan Pare-Pare, bahkan juga masih tertinggal dengan AHH Toraja Utara dan Tana Toraja yang AHH-nya dalam tiga tahun terakhir selalu berada diatas rata-rata AHH Sulsel dan mengalahkan AHH Kota Makassar dan Kota Pare-Pare.

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021 mengalokasikan belanja sebesar Rp. **302,615,157,651 dan terealisasi senilai Rp. 271,944,677,227,-** atau **89.86 % dan mampu menghasilkan kinerja sasaran sebesar 100.17 %**. Anggaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk 9 Program oleh 4 Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas Pemuda Olahraga dan BLUD RSUD Sawerigading, Capaian ini bermakna bahwa realisasi kinerja yang bisa dicapai Pemerintah Kota Palopo masih lebih besar, daripada realisasi keuangan. Sebab kinerja sasaran kedua berada pada angka 100.17% sementara realisasi keuangan pada angka 89.86 %.

**Tabel 3.3.8**

**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Kinerja Keuangan**

Tahun	Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)	Anggaran
2021	100.17	89.86	271,944,677,227
2020	100.8	94.53	265,276,831,053
2019	100.7	95.47	208,796,388,473

Berikut adalah tabel program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran kedua meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

**Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 2**

Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
Prog Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	92,547,125,935	84,100,785,436	90.87
Prog Peningkatan kapasitas Sumebr Daya manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	4,099,106,722	3,947,760,197	96.31
Prog. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan	505,783,000	505,035,000	99.85

Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
Progr. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	71,760,000	70,010,000	97.56
Prog Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	71,043,890,786	59,967,731,195	84.41
Prog Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sawerigading	63,624,107,208	57,438,637,948	90.28
Prog Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Sawerigading	64,126,550,000	60,082,837,381	93.69
Prog Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda & Olahraga	310,404,000	308,461,820	96.40
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	6,286,430,000	5,523,418,250	87.86
<b>Kinerja Anggaran</b>		<b>302,615,157,651</b>	<b>271,944,677,227</b>	<b>89.86</b>

### Sasaran III : Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)

Sasaran Pembangunan ketiga Pemerintah Kota Palopo adalah meningkatnya derajat kesejahteraan social dengan dua indicator yakni persentase penduduk miskin dan PDRB per Kapita. Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 ditargetka menurun pada angka 6.57% dan PDRB per kapita ditargetkan berada pada angka 42 juta/kapita/tahun.

Sampai akhir tahun 2021, tingkat realisasi pencapaian target kinerja penurunan penduduk miskin berada pada angka 80.71% dari target yang ditentukan, sementara PDRB per kapita berhasil direalisasikan diatas atau melampaui target 2021 dengan tingkat capaian kinerja 110.76%. sehingga rata-rata pencapaian kinerja sasaran ketiga pembangunan daerah Kota Palopo berada pada angka 95.74%. Pencapaian target kinerja 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja 2019		Realisasi		Tahun 2021			Terhadap RPJMD
			2020	Target Kinerja Tahun	Realisasi Kinerja Tahun	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	1	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.82	7.85	6.57	8.14	80.71	5.99
	2	PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	43.02	42.61	42	46.52	110.76	44
Rata-Rata Kinerja Sasaran III Tahun 2021							95.74	

Tabel diatas memperlihatkan bahwa :

- Persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2021 (8.14%), lebih banyak atau meningkat dibandingkan tahun 2020 (7.85%) atau 2019 (7.82%).
- Capaian persentase penduduk miskin Kota Palopo pada tahun 2021, masih berada dibawah target yang ditentukan pada tahun 2021, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2023) baru memenuhi 73.59%.
- PDRB per Kapita Masyarakat Kota Palopo Tahun 2021 (46.52 Juta/Kapita/Thn), lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 (42.61 juta/kapita/tahun) dan 2019 (43.02 juta/kapita/tahun).
- Capaian kiner PDRB per Kapita Kota Palopo pada tahun 2021, berhasil melampaui target yang ditentukan pada tahun 2021, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2023) juga telah berada diatas atau melampaui target akhir RPJMD (105.73%).

### Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kota Palopo 2021 (Maret), pada angka 8.14%, capaian ini masih berada dibawah target daerah 2021 yakni 6.57%. Ini menunjukkan kinerja pencapaian indicator ini hanya sebesar 80.71% atau berada **dibawah target yang ditentukan**. Secara internal Kota Palopo, persentase penduduk miskin tahun 2021, juga belum lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka 7.85% atau tahun 2019 (7.82%). Jumlah penduduk miskin Kota Palopo tahun 2021 meningkat sebanyak 500 jiwa dibandingkan kondisi Tahun 2020

Meski demikian, persentase penduduk miskin Kota Palopo 2021, masih lebih baik dibandingkan persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan Tahun 2021 yakni 8.78% dan nasional yang pada tahun 2021 berada pada angka 9.71%. Termasuk beberapa kabupaten yang berbatasan langsung, misalnya Luwu Utara (13.59%), Kabupaten Luwu (12.53%), Kabupaten Toraja Utara (11.99%).

Di Sulawesi Selatan, persentase penduduk miskin Kota Palopo ini, adalah yang tertinggi diantara tiga Kota di Sulawesi Selatan yakni Pare-Pare (5.40%) dan Kota Makassar (4.82%). Semua kondisi diatas menempatkan persentase penduduk miskin Kota Palopo berada pada peringkat 9 (sembilan) terendah dari 24 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana yang tertinggi adalah Kabupaten Jenepono (14,28 persen), sedangkan yang terendah Kota Makassar (4,82 persen).



## Penduduk Miskin Kota Palopo “Terendah ke Dua” di Luwu Raya

Periode Maret 2020 s.d Maret 2021

**Persentase Penduduk Miskin Palopo 2021 (8.14%) MASIH LEBIH BAIK** dari rata-rata persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan yakni 8.78% dan nasional 10.14 %.

Selain Lutim, **PERSENTASE** penduduk miskin Kota Palopo 2021 (Maret) **MASIH LEBIH BAIK** DIBANDINGKAN persentase penduduk miskin beberapa kabupaten yang **berbatasan langsung dengan Palopo**, misalnya Luwu Utara (13.59%), Kabupaten Luwu (12.53%), Kabupaten Toraja Utara (11.99%).

Dari sisi Jumlah, Penduduk Miskin Palopo : (2021) 15.212 Jiwa, jauh lebih sedikit dibandingkan Kab Luwu (46.260 Jiwa), Kab Luwu Utara (43.150 Jiwa, Kab Luwu Timur (20.099 Jiwa) atau Toraja Utara 28.390 Jiwa)



Wilayah	Tahun 2021	
	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
Palopo	8.14	15.212
Luwu	12.53	46.260
Luwu Utara	13.59	43.150
Luwu Timur	6.94	20.099

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

Garis kemiskinan Kota Palopo pada Maret 2021 berkisar Rp 383.007,- per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak Rp 362.859,- per kapita per bulan. Secara rinci Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Palopo Maret 2021 meningkat 0,22 poin dari 0,95 menjadi 1,17 dibanding Maret 2020. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Palopo Maret 2021 turut pula meningkat 0,09 poin dari 0,21 menjadi 0,30 dibanding periode sebelumnya

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meningkatnya indeks ini menunjukkan semakin jauhnya pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan serta semakin besar pula ketimpangan pengeluaran yang terjadi antar penduduk miskin.

Berikut adalah capaian indikator kemiskinan dan perbandingan capaian Kota Palopo dengan beberapa daerah kabupaten/kota lain di Sulsel, tahun 2021 :

Indikator	Tahun 2021						
	Kota Palopo	Kota Pare-Pare	Kota Makassar	Kab Luwu	Kab Luwu Utara	Kab Luwu Timur	Sulsel
Jml Penduduk Miskin (Dalam ribuan)	15,21	7,93	74,69	46,26	43,15	20,99	765,46
Persentase Penduduk Miskin	8.14	5.4	4.82	12,59	13.59	6.94	8.53
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.17	0.72	0.76	1.77	2.07	1.09	1.4
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.30	0.13	0.16	0.46	0.49	0.26	0.34
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	383,007	383,471	475,444	359,925	368,716	371,947	384,455

**Beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya kemiskinan di Kota Palopo adalah sebagai berikut :**

- Meningkatnya garis kemiskinan Kota Palopo menjadi 383,007 per kapita/bulan di tahun 2021 dari 362,859 per kapita/bulan di tahun 2020 menyebabkan lebih banyak penduduk yang memang sudah berpendapatan rendah atau pendapatannya menurun selama tahun 2021, akhirnya berada dibawah garis kemiskinan dan kemudian dihitung sebagai penduduk miskin.
- Penurunan pendapatan masyarakat Kota Palopo tahun 2021, dipicu oleh adanya perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan serba terbatas, dimana sepanjang tahun 2021 diberlakukan pembatasan social berskala besar dan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka menyikapi pandemic covid 19.
- Sejumlah pembatasan tersebut kemudian menghambat sebagian besar aktifitas berusahanya untuk mendapatkan pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kondisi ini sangat dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama buruh tani, buruh konstruksi dan nelayan serta pekerja di sector informal lainnya. Buruh tani yang diupah harian pada lapangan usaha pertanian, tidak dapat bekerja karena pemilik lahan juga menunda aktifitas produksinya. Ini juga dirasakan oleh kelompok nelayan, yang produksinya tidak mampu diserap oleh pasar, karena konsumsi rumah tangga yang tertahan. Semuanya kemudian berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
- Demikian pula dengan buruh konstruksi yang diupah harian tidak dapat bekerja, akibat penundaan sejumlah proyeksi konstruksi dan investasi di daerah yang direchedule ulang oleh investornya akibat pembatasan social tersebut.
- Penutupan sejumlah usaha sector informal akibat sepiunya konsumen yang diikuti pemutusan hubungan kerja terutama bagi tenaga kerja harian lepas, juga memberi andil dalam peningkatan angka kemiskinan. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang terlibat dalam usaha tersebut sebagai tenaga kerja harian lepas. Termasuk pekerja informal di sector transportasi dan akomodasi, pariwisata dan perhotelan.
- Semakin terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

**Solusi yang ditempuh Pemerintah Kota Palopo :**

Berangkat dari kondisi ini, untuk terus berupaya menekan besaran penduduk miskin di Kota Palopo, upaya terpadu dan sinergi akan tetap menjadi prasyarat utama dalam penanganannya, dengan tidak menjadikan satu perangkat daerah saja sebagai *solution maker* penanganan kemiskinan. Upaya upaya tersebut adalah :

- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, berbasis keluarga ; rumah tangga dan individu dengan memperluas Cakupan dan Akses Layanan Dasar Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pengendalian Keterjangkauan Harga serta Keteraksesan Barang Bersubsidi
- Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan mengembangkan Pengembangan Kualitas SDM (hard and soft skill), Kesetaraan dan Produktifitas Keluarga
- Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil dengan mengembangkan Iklim dan Kesempatan Berusaha, Kelembagaan serta Kemitraan Usaha
- Membentuk Kebijakan Sinergi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan memanfaatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Program OPD, Dunia Usaha dan Masyarakat, Berbasis DTKS dan Lokus Prioritas.
- Menjadikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai target sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.
- Memastikan masyarakat miskin memiliki akses pada pangan dan kesehatan, bahkan

terus berkembang pada layanan sesuai standar pelayanan minimal bidang pendidikan, perumahan, serta social. Salah satunya adalah pembuatan rumah pangan yang menyediakan Sembilan bahan pokok, sesuai harga pada tingkat distributor, yang pengelolaannya dilakukan Dinas Perdagangan Kota Palopo.

- Strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan pada beberapa aspek yakni meringankan beban pengeluaran penduduk miskin, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan mengembangkan keberdayaan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.
- Penanganan sasaran penanganan kemiskinan diarahkan pada skala perorangan, skala rumah tangga, skala komunitas dan skala usaha dan ekonomi masyarakat miskin.
- Beberapa proyek startegis penanganan kemiskinan di Kota Palopo adalah bantuan rastra daerah, (tidak termasuk rastra dari APBN), bantuan pembayaran premi kesehatan per jiwa penduduk miskin (diluar Program Penerima Bantuan Iuran APBN), bantuan bedah rumah untuk keluarga/rumah tangga miskin, penanganan kawasan kumuh dimana komunitas masyarakat miskin menetap, dan pemberdayaan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin, dsb.
- Penanganan kemiskinan juga diarahkan dengan upaya pengendalian penduduk melalui program KB keluarga miskin, pembinaan keluarga dan pengarusutamaan gender dengan sasaran masyarakat miskin, dsb.

Pemerintah Kota Palopo melaksanakan sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang berada di sejumlah perangkat daerah. Total jumlah dana yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk program mencapai sasaran ini sebanyak Rp. **34,720,212,160,-** dengan realisasi sebesar Rp. **30,924,979,509** (89.07%) dengan rincian sebagai berikut :

Program	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	130,742,000	130,356,175	99.70
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	188,903,250	173,396,043	91.79
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	2,805,394,000	2,803,580,055	99.94
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan	108,020,000	107,995,000	99.98
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan	170,204,000	170,204,000	100.00
Program Pengendalian Penduduk	Dinas PP & KB	35,000,000	35,000,000	100.00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PP & KB	6,286,430,000	5,523,418,250	87.86
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas PP & KB	176,510,000	169,510,000	96.03

Program	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi
Program Perlindungan Perempuan	Dinas PP & PA	295,161,750	295,158,937	100.00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	244,285,100	218,334,500	89.38
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	408,473,400	401,607,850	98.32
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	53,932,000	53,716,000	99.60
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian	55,925,000	55,697,000	99.59
Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	387,666,000	387,186,231	99.88
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	606,506,000	606,506,000	100.00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	72,304,000	71,924,249	99.47
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan	338,574,500	338,420,201	99.95
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan	58,705,000	58,704,550	100.00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	22,297,476,160	19,324,264,468	86.67
<b>JUMLAH</b>		<b>34,720,212,160</b>	<b>30,924,979,509</b>	<b>89.07</b>



Berikut adalah perbandingan tingkat realisasi kinerja indicator persentase penduduk miskin terhadap tingkat realisasi kinerja keuangan program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam tiga tahun terakhir :

**Tabel 3.3.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Kinerja Keuangan**

Tahun	Capaian Kinerja Indikator (%)	Kinerja Keuangan (%)	Anggaran
2021	80.71	89.07	30,924,979,509
2020	97.32	95.47	20.232,383.542
2019	103.60	88.82	40,580,936,807

### PDRB Per Kapita

Angka PDRB per Kapita masyarakat Kota Palopo Tahun 2021 berada pada angka 46.52 Juta/Kapita/Thn). Capaian ini melampaui angka target PDRB per Kapita sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sebesar 42 juta/kapita/tahun. Sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya pada tahun 2021 pada angka 110.76%.

Jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, PDRB per kapita Tahun 2021 Kota Palopo lebih baik atau meningkat dibandingkan 2020 (42.61 juta/kapita/tahun) dan 2019 43.02 juta/kapita/tahun. Bahkan juga telah melampaui target akhir RPJMD sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 Kota Palopo, tentang Perubahan RPJMD periode 2018-2023.

Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		Terhadap RPJMD	
	2019	2020	Target Kinerja Tahun	Realisasi Kinerja Tahun	% Capaian Kinerja	Target Akhir RP-JMD	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	43.02	42.61	42	46.52	110.76	44	105.73

PDRB per kapita (atas dasar harga berlaku) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Peningkatkan PDRB per kapita atau pendapatan per kapita masyarakat sebuah daerah, ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Berikut adalah perkembangan PDRB (ADHB & ADHK) Kota Palopo dalam tiga tahun terakhir, 2019-2021 :

Indikator	Tahun		
	2021	2020	2019
Nilai PDRB			
ADHB (Milyar)	8714.31	8025.29	7942.48
ADHK (Milyar)	5768.28	5472.08	5447.36
Jumlah Penduduk (Jiwa)	187,330	184,681	184,614
PDRB per Kapita (ADHB) (Juta/Kapita/Thn)	46.52	42.61	43.02

Jika dibandingkan tahun 2020, Pendapatan per kapita masyarakat Kota Palopo tahun 2021, meningkat 3.91 Juta, dengan persentase kenaikan sebesar 6.6% dibandingkan tahun 2020. Persentase kenaikan Ini menempatkan Kota Palopo sebagai kota dengan persentase kenaikan PDRB per kapita tertinggi di Sulsel. Bahkan kenaikan pendapatan per kapita 2021, menjadi kenaikan pendapatan per kapitan terbesar dalam kurun waktu lima tahun terakhir masyarakat Kota Palopo.

### Kota Dengan **Persentase Kenaikan** PDRB per Kapita Paling Tinggi

PDRB per Kapita Naik 3.91 Juta, **% Kenaikan** Terbesar Dari 3 Kota di Sulsel

Kota	PDRB Per Kapita 2020	PDRB Per Kapita 2021	% Kenaikan
Palopo (Juta)	43.66	46.52	6.6
Pare-Pare (Juta)	48.5	51.18	5.5
Makassar (Juta)	125.32	133.31	6.4

Kenaikan PDRB per Kapita Kota Palopo Tahun 2021, adalah **Yang Terbesar Dalam Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir**

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37	40.32	43.02	42.61	46.52
2	<b>Kenaikan</b> PDRB Per Kapita (Juta/Thn)	2.82	3.32	2.7	-0.41	3.91
3	<b>Persentase Kenaikan</b> PDRB Per Kapita (%)	8.25	8.97	6.70	-0.95	9.18

Berikut adalah perbandingan pendapatan per kapita beberapa kabupaten/kota di Sulsel dalam tiga tahun terakhir 2019-2021 :

Wilayah	Capaian PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Tahun)		
	2019	2020	2021
Kota Palopo	43.02	42.01	46.52
Kota Pare-Pare	49.8	49.9	51.18
Kota Makassar	116.87	125.25	133.31
Kabupaten Luwu	43.25	43.85	48.55
Kabupaten Luwu Utara	41.7	40.99	44.32
Kabupaten Luwu Timur	70.07	70.49	78.58
Sulawesi Selatan	56.98	56.51	59.66
Nasional (PDB)	59.1	56.9	62.2

## Factor yang berpengaruh

PDRB per Kapita dipengaruhi dua factor kunci yakni, **Jumlah atau Nilai PDRB** (Harga Berlaku maupun Konstan) dan factor **Jumlah Penduduk**. Jika kedua angka indicator ini tumbuh dalam kondisi yang tidak seimbang, maka PDRB per kapita penduduk, dipastikan akan turun. Olehnya upaya peningkatan produktifitas barang dan jasa yang dibarengi upaya pengendalian penduduk secara seimbang menjadi kunci dasar dalam meningkatkan PDRB per Kapita Penduduk.

## Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan nilai/angka PDRB di Kota Palopo :

- Mempermudah dan menyederhanakan perizinan daerah sehingga lebih cepat, lebih mudah dan lebih jelas, sehingga mampu mewujudkan peningkatan nilai investasi daerah. Ini dilakukan dengan pemantapan layanan di Mall Pelayanan Publik dan inovasi seperti MABASSA, Tol Info oleh DPMPSTSP Kota Palopo.
- Meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sehingga SDM lebih produktif.
- Meningkatkan sector sector produktif dan sector potensial daerah, misalnya pertanian, jasa, kuliner dan beberapa lapangan usaha ekonomi kreatif yang ada, termasuk pariwisata daerah.
- Mengakselerasi infratstruktur daerah yang mendukung sector sector ekonomi daerah. (hulu-hilir)
- Memastikan penegakan upah dan gaji buruh sesuai UMP
- Mengakselerasi sector swasta dan dunia usaha melalui stimulant dan fasilitasi agar berkembang.
- Menciptakan dukungan infrastruktur baik secara fisik, non fisik maupun dari SDM yang akan digunakan dalam berbagai bidang

## Mengendalikan Jumlah Penduduk

- Pemerintah Kota Palopo juga gencar melaksanakan program pengendalian jumlah penduduk, yakni program keluarga berencana yang diimplementasikan dalam program kampung KB. Sampai dengan tahun 2021, kampung KB sudah ada di 10 Kelurahan (20.41%), tahun 2019-2020 hanya ada di 9 kelurahan. Kampung KB ini difokuskan pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi seperti di pesisir Kota Palopo, daerah dengan pemukiman kumuh dan kantong kemiskinan.
- Menekan laju pertumbuhan penduduk dimana pada tahun 2021 sebesar 1.92%, tahun 2020, sebesar 2.17%, 2019 sebesar 2.18%, dimana pada tahun 2017 2.31%.

## Penduduk Kota Palopo Tahun 2019- 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Jumlah	Jiwa	184.614	184,681	187,330
2	Laki-Laki	Jiwa	89.917	92,444	93,782
3	Perempuan	Jiwa	94.697	92,237	93,549
4	Pertumbuhan	%	2,18	2.17	1.92
5	Densitas	Jiwa/Km2	746	746	757
6	Sex Ratio	%	94,27	100.22	100,24

*Sumber Data : Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2022*

## Perbandingan Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja

Untuk mencapai atau merealisasikan kinerja indikator pendapatan per kapita masyarakat tahun 2020, Pemerintah Kota Palopo merealisasikan anggaran senilai Rp. 14,653,468,424 dengan kinerja realisasi 92.67%. Dibandingkan pencapaian atau realisasi kinerja indikator pendapatan per kapita yang tahun 2021 berada pada angka 110.76%, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo berhasil menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan realisasi keuangan.

Berikut adalah table program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kota Palopo Tahun 2021 :

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	99,316,126	96,053,600	96.72
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	40,000,000	40,000,000	100.00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	11,300,000	8,000,000	70.80
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	244,285,100	218,334,500	89.38
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	408,473,400	401,607,850	98.32
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	53,932,000	53,716,000	99.60
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4,505,570,559	4,494,247,068	99.75
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	168,066,000	167,652,870	99.75
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	308,101,100	308,097,800	100.00
Program Penyuluhan Pertanian	387,666,000	387,186,231	99.88
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	37,220,000	37,220,000	100.00
Program Promosi Penanaman Modal	56,105,000	55,999,380	99.81
Program Pelayanan Penanaman Modal	516,550,000	506,550,000	98.06
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	322,573,000	245,398,400	76.08
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	606,506,000	606,506,000	100.00
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	7,650,000	7,650,000	100.00
Program Penilaian Kesehatan Ksp/ Usp Koperasi	3,650,000	3,650,000	100.00
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	390,303,950	375,784,400	96.28
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	3,700,000	3,700,000	100.00



Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	35,189,000	35,184,800	99.99
Program Pengembangan UMKM	36,850,000	36,358,275	98.67
Program Pengendalian Penduduk	35,000,000	35,000,000	100.00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6,286,430,000	5,523,418,250	87.86
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	176,510,000	169,510,000	96.03
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,021,769,750	789,143,000	77.23
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	50,100,000	47,500,000	94.81
<b>Total</b>	<b>15,812,816,985</b>	<b>14,653,468,424</b>	<b>92.67</b>

#### Sasaran IV : Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)

Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan di Kota Palopo Tahun 2021 ditandai dengan menurunnya persentase luas kawasan kumuh. Jika tahun 2020 berada pada angka 0,02 (100%), pada tahun 2021 luas kawasan kumuh menurun menjadi 1,09 Ha atau 147,70. Ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran IV, berada pada angka 147,70 dari target 2021.

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran keempat sebesar 147,70 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 147,70 atau memiliki predikat **Sedang**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran keempat nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran keempat hanya memiliki 1 IKU.

**Tabel 3.3.14**  
**Capaian Kinerja Indikator Sasaran IV**

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
TARGET	REALISASI				
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	1.61	1,09	147,70%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				147,70	Sangat Tinggi
<b>NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN IV</b>				<b>147,70%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Untuk mengetahui posisi kinerja 2021 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3.15**  
**Pengukuran kinerja sasaran IV**

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan (S.4))	Persentase areal kawasan kumuh	0,02	1.61	1,09	147,70	68,45	98,11

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian 2021 telah memenuhi 67,70% target akhir RPJMD 2023. Kinerja penanganan kawasan kumuh di Kota Palopo digambarkan sebagai berikut :

- Tahun 2014 sesuai SK Walikota luas kumuh Kota Palopo yaitu 89.33 Ha.
- Tahun 2018, luas kawasan kumuh di Kota Palopo menurun menjadi 20,85 Ha.
- Tahun 2019 luas kawasan kumuh tersisa 3.85 Ha
- Tahun 2020 luas kawasan kumuh tersisa 1.79 Ha

Beberapa aspek yang menguatkan kinerja penanganan kawasan kumuh di Kota Palopo adalah :

- Penanganan kawasan kumuh di Kota Palopo dilaksanakan secara bersinergi pada beberapa perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melaksanakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perumahan pemukiman
- Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana ke PU-an skala lingkungan dan kawasan
- Dinas Ketahanan Pangan mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan lingkungan yang selain bebas kumuh namun juga produktif
- Dinas Lingkungan Hidup menangani kebersihan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tetap bersih
- Pelaksanaan Program dan Pendampingan Kotaku di sejumlah kelurahan di Kota Palopo
- Perencanaan penanganan kawasan kumuh dilaksanakan berbasis masyarakat secara partisipatif.

**Tabel 3.3.16**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV**  
**dengan Kinerja Keuangan**

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
67,70	<b>88,24</b>

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 135.940.914.470,- yang dikelola oleh 5 Perangkat Daerah (20 Program) dengan realisasi sebesar Rp 117.078.204.606,- atau 88,24%.

Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran yang berpredikat tinggi (88,24%).

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran keempat meningkatkan kapasitas dan layanan infrastruktur perkotaan

**Tabel 3.3.17**  
**Program dan Realisasi Keuangan Sasaran IV**

Program	Pagu	Realisasi	% Tingkat Realisasi
Program Rumah Layak Huni	97,541,800	97,490,800	99,95
Program Pengembangan Perumahan	108,020,000	107,995,000	99,98
Program Kawasan Permukiman	170,204,000	170,204,000	100
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	56,900,000	56,895,000	100
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati),	3,594,456,950	3,587,241,150	99,80
Program Pengelolaan Persampahan	14,813,057,249	14,437,419,164	97,46
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),	3,412,509,399	3,403,062,250	99,72
Program Penyelenggaraan Jalan	21,699,844,339	21,052,661,718	97,02
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4,222,964,500	4,212,135,000	99,74
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2,540,890,000	2,537,835,500	99,88
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	606,506,000	606,506,000	100
Program Pengawasan Keamanan Pangan	21,606,174	21,458,300	99,75
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	307,669,750	307,353,373	99,90

Program	Pagu	Realisasi	% Tingkat Realisasi
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6,007,132,000	5,969,870,788	99,38
Program Penataan Bangunan Gedung	68,538,619,250	50,791,909,625	74,11
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	790,467,000	790,435,000	99,30
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4,505,570,559	4,494,247,068	99,75
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	168,066,000	167,652,870	99,75
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	55,925,000	55,697,000	99,59
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4,222,964,500	4,212,135,000	99,74
<b>Rata-Rata Realisasi Keuangan</b>	<b>135.940.914.470</b>	<b>117.078.204.606</b>	<b>88,24</b>

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 135,94 Milyar lebih. Sehingga tingkat realisasi dapat dicapai sebesar 88,24%.

#### Sasaran V : Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran kelima sebesar 118,13 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 118,13 atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasrankelima nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran, sebab sasaran kelima hanya memiliki 1 IKU

**Tabel 3.3.18**  
**Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan V**

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan	67.95	80,27	118,13%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				118,13%	Sangat Tinggi
<b>NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN V</b>				118,13%	Sangat Tinggi



Tabel 3.3.18 diketahui capaian kinerja sasaran pembangunan daerah ke 5 yaitu 118,13 %. Dimana indikator kinerja sasarannya adalah Indeks Layanan Jalan, target tahun 2021 adalah sebesar 67,95 sedangkan realisasi hingga akhir tahun 2021 adalah sebesar 80,27. Ini berarti bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah melebihi target yang telah ditetapkan sehingga predikat capaian adalah **Sangat Tinggi**

Untuk mengetahui posisi kinerja 2021 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3.19**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran V**

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja 2021(%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan	73,00	67,95	67,16	98,84	68,45	98,11

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2021 melebihi 117,26% target akhir RPJMD 2023. Pemerintah Kota Palopo sangat optimis mampu melampaui target yang telah di tetapkan di RPJMD pada akhir tahun 2023 nanti. Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 80,27 merupakan lonjakan yang cukup besar dibandingkan capaian tahun 2020 yang hanya pada poin 78,78. Tetapi tentunya capaian ini akan terus ditingkatkan di masa – masa yang akan datang.

Sasaran pembangunan daerah yang ke 5 ini dikontribusi oleh capaian indikator Indeks Layanan Jalan. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah jaringan terhadap jumlah wilayah-wilayah yang terhubung. Berdasarkan analisis melalui data Dinas Perhubungan yang ada, didapatkan angka 73,00 atau lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2021. Oleh karena itu, tingkat capaian 2021 mencapai 118,1%, atau 117,26% jika dibandingkan dengan target RPJMD 2023.

**Tabel 3.3.20**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran V dengan Kinerja Keuangan**

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
<b>98,84</b>	<b>98,37</b>

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 25.112.353.738,- yang dikelola oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah (2 Program) dengan realisasi sebesar Rp 24.455.723.968,- atau 98,37%.

Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran yang berpredikat sangat tinggi (98,84%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya atau dengan kata lain kinerja sasaran lebih besar daripada kinerja keuangan

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang kelima yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta infrastruktur strategi daerah.

**Tabel 3.3.21**  
**Program dan Realisasi Keuangan Sasaran V**  
**Tahun 2021**

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Penyelenggaraan Jalan	<b>21,699,844,339</b>	<b>21,052,661,718</b>	<b>97,02</b>
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<b>3,412,509,399</b>	<b>3,403,062,250</b>	<b>99,72</b>
<b>Rata-Rata Realisasi Keuangan</b>	<b>25.112.353.738</b>	<b>24.455.723.968</b>	<b>98,37</b>

#### **Sasaran VI : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)**

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran keenam sebesar 83,34 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 83,34 atau memiliki predikat Sangat Tinggi. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran ketujuh nilai capaian sasaran diolah menggunakan metode rata-rata data kelompok, sebab sasaran keenam memiliki 2 IKU.

**Tabel 3.3.22**  
**Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah VI**

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	10	15	66,67%	Sedang
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	79.98	80	100,02%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				83,34	Tinggi
<b>NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN VI</b>				<b>83,34</b>	<b>Tinggi</b>

Sasaran ini memiliki dua indikator, yakni luas kawasan terdampak banjir dan persentase luas ruang terbuka hijau. Luas kawasan terdampak banjir didapatkan berdasarkan riwayat kejadian banjir di Kota Palopo selama tahun 2021. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, didapatkan beberapa kejadian banjir di 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Telluwanua, yaitu Kelurahan Pentojangan (16.2 Ha) dan Kelurahan Salubattang (38.75 Ha). Total areal yang terdampak banjir adalah 54.95 ha. Capaian ini jauh dari target 2021 yang menargetkan 15 ha areal terdampak banjir.

Sementara itu, indikator kedua adalah persentase luas ruang terbuka hijau. Target Nilai Indikator Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2021 adalah sebesar 79.98 dan terealisasi sebesar 80 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,02%. Pencapaian yang melampaui target pada tahun 2020, adalah merupakan upaya dan bentuk komitmen pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan Palopo sebagai kota yang hijau. Bentuk dan dukungan Kuat Walikota dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran di TA 2021, baik untuk penambahan luasan RTH berupa pembangunan taman.

Untuk mengetahui posisi kinerja 2021 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3.23**  
**Pengukuran kinerja sasaran VI**

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja 2021(%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir	54,95	10	15	150	2	750
	Persentase Luas ruang terbuka hijau	76,95	79,98	80	100,02	80,1	99,87

Dari tabel 3.3.23 diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator Luas kawasan terdampak banjir adalah 15. Capaian ini jauh diatas target tahun 2021 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 10 . Untuk indikator yang kedua yaitu persentase luas ruang terbuka hijau realisasi kinerja tahun 2021 yaitu 100,02. Capaian ini sedikit diatas target tahun 2021 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 79,98 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,02 %. Namun jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian ini masih sedikit di bawa target akhir yaitu 80,1 atau sekitar 99,87% dari target akhir RPJMD.

Pencapaian yang melampaui target pada tahun 2020 adalah merupakan upaya dan bentuk komitmen pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan Palopo sebagai kota hijau. Bentuk dan dukungan kuat Walikota dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran di tahun anggaran 2021 untuk penambahan luasan RTH berupa pembangunan taman

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara belum sesuai karena adanya kendala proses pembebasan lahan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau yang belum dapat direalisasikan
2. Belum semua RTH yang berfungsi optimal karena:
  - a. Status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota;
  - b. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam merawat dan memelihara RTH yang disediakan oleh pemerintah.

Sementara upaya tindak lanjut yang dilakukan yakni, Perlunya penyusunan strategi yakni:



- Penentuan prioritas jenis RTH yang perlu dibangun serta lokasi berdasarkan analisa kebutuhan;
- Berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Kantor ATR BPN dalam rangka upaya percepatan pembebasan lahan, mengingat target penambahan RTH dibangun dan dipelihara;
- Melakukan analisa permasalahan secara rutin untuk target lokasi dan luasan yang seharusnya dioptimalkan namun belum tercapai, sehingga dapat diketahui akar permasalahan serta upaya yang perlu segera dilakukan.

**Tabel 3.3.24**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran VI**  
**dengan Kinerja Keuangan**

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
<b>83,34</b>	<b>99,81</b>

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 6.762.854.500,- yang dikelola oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui 2 (dua) Program dengan realisasi sebesar Rp 6.749.970.500 atau 99,81%

Jika persentase realisasi keuangan tersebut dibandingkan dengan realisasi tingkat pencapaian sasaran yang berpredikat Sedang (83,34%), maka dapat dikatakan, Pemerintah Kota Palopo mampu mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya atau dengan kata lain kinerja sasaran lebih besar daripada kinerja keuangan

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang keenam yaitu meningkatnyakualitas pengelolaan lingkungan hidup.

**Tabel 3.3.25**  
**Program dan Realisasi Keuangan Sasaran VI**

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Pengelolaan an Pengembangan Sistem Drainase	4.222.964.500	4.212.135.000	99,74
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.540.890.000	2.537.835.500	99,88
<b>Rata-Rata Realisasi Keuangan</b>	<b>6.762.854.500</b>	<b>6.749.970.500</b>	<b>99,81</b>

## Sasaran VII : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)

Capaian indikator kinerja utama pada sasaran ketujuh sebesar **85,75** dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar **85,75** atau memiliki predikat **Tinggi**.

**Tabel 3.3.26**

### Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah VII

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah(Nilai)	70	60.03	85,75	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				85,75	Tinggi
<b>NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN VII</b>				<b>85,75</b>	<b>Tinggi</b>

Sampai saat laporan ini disusun nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah belum dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga nilai yang tertera pada laporan ini adalah nilai perolehan tahun 2020, yaitu 60,03.

Dari tabel 3.3.26 diatas dapat diketahui bahwa nilai capaian sasaran 7 adalah 85,75 dengan predikat **Tinggi**. Untuk mengetahui posisi kinerja 2021 terhadap target akhir RPJMD,- disajikan dalam table sebagai berikut :

**Tabel 3.3.27**

### Pengukuran kinerja sasaran VII

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja 2021(%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas pemerintahan daerah	52,43	70	60,03	85,75	80	75,03

Dari tabel 3.3.27 diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2021 untuk indikator nilai akuntabilitas pemerintahan daerah adalah 60,03. Capaian ini jauh dibawah target tahun 2021 yang telah ditetapkan di RPJMD yaitu 70. Capaian tahun 2021 hanya pada 85,75 Jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian ini masih berkontribusi sebesar 75,03

**Tabel 3.3.28**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran VII**  
**dengan Kinerja Keuangan**

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
<b>85,75</b>	<b>93.44</b>

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021 mengalokasikan belanja sebesar Rp. 31.821.140.100,- yang dikelola oleh 6 Perangkat Daerah yaitu Setda, Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Dinas Persandian, Dinas Statistik dan BKPSDM melalui 10 Program dengan realisasi sebesar Rp **25.950.927.091,-** atau **93.44%**.

Melihat tabel 3.3.28 diketahui bahwa capaian kinerja sasaran 7 belum optimal walaupun telah disertai dengan penganggaran yang cukup. Namun di tahun – tahun mendatang Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palopo.

Berikut adalah tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran pembangunan daerah yang ketujuh yaitumeningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel 3.3.29**  
**Program dan Realisasi Keuangan Sasaran VII**

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	584.158.000	582.937.680	99,79
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	637.142.500	623.595.950	97,87
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.796.418.000	1.780.763.511	99,13
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	89.280.000	81.173.519	90,92
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	18.938.285.750	13.768.981.511	72,70
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	77.120.000	74.775.000	96,96

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Kepegawaian Daerah	2.214.236.500	1.951.094.893	88,12
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.901.497.100	2.714.968.500	93,57
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.574.572.250	4.364.206.527	95,40
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	8.430.000	8.430.000	100,00
<b>Rata-Rata Realisasi Keuangan</b>	<b>31.821.140.100</b>	<b>25.950.927.091</b>	<b>93.44</b>

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 31,82 Milyar dengan tingkat realisasi sebanyak 93.44%. Kinerja yang mampu direalisasi pada sasaran ini mencapai 85,75%. Artinya realisasi kinerja yang dihasilkan masih lebih kecil dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dipakai, sehingga Pemerintah Kota Palopo belum mampu melaksanakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang digunakan.

#### Sasaran VIII : Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)

Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada sasaran delapan sebesar 100.87 dengan nilai kinerja capaian sasaran diperoleh nilai sebesar 100.87 atau memiliki predikat **Sangat Tinggi**. Sesuai metode pengukuran berdasarkan “rata-rata kelompok”, pada sasaran kedelapan nilai capaian IKU sama dengan nilai capaian sasaran.

**Tabel 3.3.30**

#### Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah VIII

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT CAPAIAN
		TARGET	REALISASI		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	84	84,73	100.87	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN IKU				100.87	Sangat Tinggi
<b>NILAI CAPAIAN DAN PREDIKAT SASARAN VIII</b>				<b>100.87</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sesuai Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023, Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan publik yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun.



Untuk hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 meningkat dari 83,06 menjadi 84,73. Hal ini berarti menurun sebesar 1.67 %. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga pendidikan. Berikut adalah beberapa hasil survey indeks kepuasan masyarakat Tahun 2021 :

**Tabel 3.3.31**






**Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021**

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI INDEKS	IKM	KINERJA UNIT LAYANAN	MUTU PELAYANAN
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,53	89,35	Sangat Baik	A
2	RSUD Sawerigading	3,11	81,32	Baik	B
3	Puskesmas Wara		83,83	Baik	B
4	Dinas Sosial (Rastra APBN & APBD)	-	86,31	Baik	B
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	86,13	Baik	B
6	Kecamatan Wara	3,37	81,64	Baik	B
<b>Rata-rata</b>			<b>84,73</b>	<b>Baik</b>	<b>B</b>

Berikut adalah beberapa inovasi layanan publik yang dilaksanakan pemerintah Kota Palopo tahun 2021 :

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
1	BANUA MERAH 	Singkatan dari Bantuan Anak Meraih Harapan. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo. KIPP (Sinovik) TOP 30 SUL-SEL 2019
2	AIR DISUNTIK RESAH PUN TEROBATI 	Layanan Air Bersih Bagi Masyarakat menggunakan Tanki jika mengalami kesulitan air dari jaringan PDAM. Dilaksanakan oleh PDAM Kota Palopo. KIPP (Sinovik) TOP 99 Indonesia 2017, dan sampai hari ini terus dikembangkan layanannya
3	"SI CAKEP" 	Dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan ini merupakan sistem jemput bola, terkait pembuatan akta kelahiran atas bayi yang baru lahir. Aparatur Disduk Capil akan langsung mendatangi ibu dan bayinya di rumah sakit untuk membuatkan Kartu Identitas Penduduk, misalnya akte kelahiran. Sehingga ketika keluar dari perawatan Rumah Sakit, sang bayi langsung sudah memiliki akta kelahiran.
4	SIMPONI CERIA 	Adalah singkatan dari "Sistem Pendaftaran Online, Cepat, Ringkas dan Akurat". Pasien yang bermaksud mendapatkan pelayanan di RSUD baik pasien poliklinik, BPJS maupun regular, dimudahkan untuk mendaftar melalui aplikasi Whats Up dengan menggunakan Nama, NIK sesuai KTP. Inovasi layanan ini dilaksanakan untuk mengurangi jadwal tunggu yang ada di RSUD dan memberikan kepastian waktu pelayanan kesehatan terhadap pasien.

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
5	<p>"GO RIDE"</p> 	Adalah Gerakan Optimalisasi Geriatri Terpadu dan Efektif. Layanan ini dikhususkan bagi para lanjut usia yang membutuhkan layanan kesehatan. Mengingat kemampuan fisik pasien lansia yang umumnya sudah sangat terbatas, dokterlah yang akan mendatangi pasien di poli sesuai dengan keluhan kesehatannya. Pelaksana layanan ini adalah RSUD Sawerigading.
6	<p>SIPAKAINGA</p> 	Sistem Paket Layanan Pasien Paru Terintegrasi. Layanan kesehatan ini khusus bagi penderita paru yang dilaksanakan secara terintegrasi. Ini diluncurkan dalam rangka memberikan "keamanan" bagi pasien lain di RSUD, terhadap keberadaan pasien dengan gangguan kesehatan yang bersifat infeksius. Olehnya pasien dengan gangguan kesehatan infeksius pelayanannya akan dipisah dengan pasien lain, termasuk dalam hal pengambilan obat. Pelaksana layanan ini adalah RSUD Sawerigading.
7	<p>"BUGAR"</p> 	Adalah singkatan dari "Budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat". Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo
8	<p>"BU KB"</p> 	Adalah singkatan dari "Bukan Kader Biasa". Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo
9	<p>JEMPUT-ANTAR (JA)</p> 	Dilaksanakan oleh UPTD Kesehatan Adalah sebuah layanan kesehatan berbasis mobile yang pelayannya
10	<p>"SI MUD"</p> 	Sistem yang Memudahkan yang dipraktekan oleh Kecamatan Bara
11	<p>"SI ANTAR"</p> 	Diinisiasi oleh Kelurahan Amassangan. Dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan public yang menjadi kewenangan kelurahan

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
12	<p>MABASSA</p> 	Layanan Perizinan “Mudah, Akuntabel, Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik dan Aman” oleh DPMPTSP.
13	<p>FOUR IN ONE</p> 	Pelaksanaan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pelayanan administrasi penduduk
14	<p>“INI KAWAN”</p> 	Pelaksana Oleh Inspektorat Daerah Kota Palopo. Adalah sinonim dari “Klinik Konsultasi Pengawasan”
15	<p>JEMPUT-ANTAR, LAYANAN WEEKEND &amp; TOL INFO</p> 	Oleh DPMPTSP. Fokus Layanan adalah memberikan pelayanan jemput-antar berkas pengurusan perizinan
16	<p>LORONG TAMAN SURGA</p> 	Oleh Puskesmas Kelurahan Pontap dalam menjaga kesehatan masyarakat

Untuk mengetahui posisi kinerja 2021 terhadap target akhir RPJMD, disajikan dalam table sebagai berikut :

**Tabel 3.3.32**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran VIII**

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja 2021 (%)	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Kinerja s.d 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	83,06	84	84,73	100.87	86	98,52

Dari tabel 3.3.32 diatas diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 adalah 84,73, indeks ini meningkat 1,67 poin dibandingkan tahun 2020 yang lalu. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka capaian tahun 2021 ini telah mencapai 100.87% dari target yang ditetapkan.

**Tabel 3.3.33**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran VIII**  
**dengan Kinerja Keuangan**

Kinerja Sasaran (%)	Kinerja Keuangan (%)
<b>100.87</b>	<b>96.41</b>

Untuk mencapai sasaran ini, Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2021 mengalokasikan belanja sebesar Rp. **45.327.864.133,-** melalui 10 Program dengan realisasi sebesar Rp **40.076.241.309,-** atau **96.41%**.

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Palopo untuk mencapai sasaran ini sebanyak 45.32 Milyar dengan tingkat realisasi sebanyak **96.41%** Kinerja yang mampu direalisasi pada sasaran ini mencapai **100.87**. Artinya realisasi kinerja yang dihasilkan masih lebih besar dibandingkan dengan kinerja keuangan yang dipakai, sehingga Pemerintah Kota Palopo mampu melaksanakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang digunakan



**Tabel 3.3.34**  
**Program dan Realisasi Keuangan Sasaran VIII**

<b>Program</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	118.599.000	118.526.000	99,94
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	618,132,200	600,845,495	97.20
Program Aplikasi Informatika	727,673,000	727,401,000	99,96
Program Pelayanan Penanaman Modal	516,550,000	506,550,000	98,06
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	8,430,000	8,430,000	100
Program Pencatatan Sipil	45.350.000	45.350.000	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.099.106.722	3.947.760.197	96,31
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37,249,802,211	31,194,289,346	83,74
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,805,394,000	2,803,580,055	99,94
Program Tata Laksana Kelembagaan, Reformasi Birokrasi dan Layanan publik	138,827,000	123,509,216	88.97
<b>Rata-rata Realisasi</b>	<b>45.327.864.133</b>	<b>40.076.241.309</b>	<b>96.41</b>

**Sasaran IX : Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9) dengan Indikator Tingkat pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2021 (Agustus), pada angka 8.83%, jauh lebih baik atau melampaui target daerah 2021 yakni 9.03%. Ini menunjukkan kinerja pencapaian indikator ini sebesar 102.26% dari target yang ditentukan atau dengan predikat kinerja sangat baik. Pengangguran terbuka 2021 Kota Palopo juga lebih menurun atau sudah lebih baik dibandingkan realisasi tahun 2020 yang berada pada angka 10.37% dan 2019 (10.32%).

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2021			Terhadap RPJMD	
		2019	2020	Target Kinerja Tahun	Realisasi Kinerja Tahun	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.32	10.37	9.03	8.83	102.26	8.07	109.42
Rata-Rata Kinerja Indikator Sasaran IV Tahun 2021						102.26		

**Angka persentase penurunan** pengangguran tahun 2020 ke 2021 ini, adalah angka **persentase penurunan pengangguran terbuka terbaik**, yang pernah dicapai Pemerintah Kota Palopo periode sejak 2018. Dimana periode tersebut, penurunan persentase pengangguran terbuka hanya pada angka 1.28% (2018 ke 2019), sementara periode lainnya 2019-2020, persentase pengangguran justru naik.

Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2021 Kota Palopo menurun sebanyak 1320 orang, dari 8820 orang pada tahun 2020 menjadi hanya sebanyak 7500 orang pada tahun 2021. Kondisi 2021, juga lebih baik dibandingkan 2019, dimana jumlah pengangguran terbuka pada angka 8160 orang.

Tahun 2021, Kota Palopo menjadi satu-satunya wilayah di Tanah Luwu yang pada tahun 2021, jumlah pengangguran terbuka menurun. Sebab di Kabupaten Luwu Timur, pengangguran terbuka jumlahnya justru meningkat (1023 orang), Kabupaten Luwu Utara, meningkat sebanyak 1688 orang (dari 4054 menjadi 5742 orang).

Jika persentase pengangguran terbuka Kota Palopo menurun, kabupaten Luwu Utara yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo, justru mengalami peningkatan 0.9% tingkat pengangguran terbukanya pada tahun 2021 (meningkat sebanyak 1688 orang, dari 4054 menjadi 5742 orang). Demikian halnya dengan Kabupaten Luwu Timur yang persentase pengangguran terbukanya juga meningkat 0.5% pada tahun 2021. Jumlah pengangguran terbuka di Luwu Timur juga meningkat (1023 orang dari 7000-an menjadi 8000-an orang),

### Penurunan yang Kompetitif

Angka persentase Pengangguran Terbuka Kota Palopo **MENURUN sebanyak** 1.54%. Kondisi ini **LEBIH BAIK** dari Sulsel yang persentase Pengangguran Terbukanya Menurun Hanya 0.59% (Dari 6.31 Menjadi 5.72%), Kota Pare-Pare yang Menurun Hanya 0.42% (Dari 7.14 menjadi 6.72%), Kabupaten Luwu yang menurun 0.14% (Dari 4.94 Menjadi 4.8%), Kab. Luwu Timur, yang Justru Meningkat 0.5% (Dari 4.46% Menjadi 4.96%) dan Luwu Utara yang % Pengangguran Terbukanya **Juga Meningkat** 0.9% (Dari 3.01 Menjadi 3.91%).

### Terbaik dalam 6 Tahun Terakhir

**Penurunan** angka persentase pengangguran tahun 2020 ke 2021 ini, adalah angka penurunan pengangguran terbuka **TERBAIK**, yang dicapai Pemerintah Kota Palopo **SEJAK** Thn 2015 atau Enam Thn Terakhir. Dimana periode tersebut, penurunan angka persentase pengangguran ter-

buka hanya pada angka 1.28% (2018 ke 2019), sementara periode lainnya 2019-2020, persentase pengangguran justru naik.



## Pengangguran Terbuka “Turun Satu Digit”

*Tingkat Pengangguran Terbuka Periode Agustus 2020-Agustus 2021*

### “Turun Satu Digit”

Angka persentase Pengangguran Terbuka Kota Palopo 2021 (Agustus) : 8.83%, **LEBIH BAIK** dari Target Daerah 9.03% dan **LEBIH BAIK** Dibandingkan Kondisi Thn 2020 yang Berada Pada Angka 10.37%.

**JUMLAH pengangguran terbuka Kota Palopo juga MENURUN sebanyak 1315 Orang, dimana tahun 2021 hanya sebanyak 7504 orang, padahal 2020 sebanyak 8815 orang. Kondisi 2021 juga LEBIH BAIK** dibandingkan Thn 2019 dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 8314 orang

### “Penurunan yg Kompetitif”

Angka persentase Pengangguran Terbuka Kota Palopo **MENURUN sebanyak 1.54%**. Kondisi ini **LEBIH BAIK** dari Sulsel yang % Pengangguran Terbukanya Menurun Hanya 0.59% (Dari 6.31 Menjadi 5.72%), Kota Pare-Pare yang Menurun Hanya 0.42% (Dari 7.14 menjadi 6.72%), Kabupaten Luwu yang menurun 0.14% (Dari 4.94 Menjadi 4.8%), Kab. Luwu Timur, yang Justru Meningkatkan 0.5% (Dari 4.46% Menjadi 4.96%) dan Luwu Utara yang % Pengangguran Terbukanya **Juga Meningkatkan 0.9%** (Dari 3.01 Menjadi 3.91%)



**Masalahnya adalah : TPT Kota Palopo 2021, Masih Lebih Tinggi dibandingkan Kota Pare-Pare 6.72%, dan merupakan PERSENTASE TPT paling tinggi di tanah luwu, Kab Luwu (4.80%), Luwu Utara (3.91%), Luwu Timur (4.96%), Lebih Tinggi Dari TPT Sulsel 2021 (5.72%)**

### “Terbaik dlm 6 Thn Terakhir”

Penurunan angka persentase pengangguran tahun 2020 ke 2021 ini, adalah angka penurunan pengangguran terbuka **TERBAIK**, yang dicapai Pemerintah Kota Palopo **SEJAK** Thn 2015 atau Enam Thn Terakhir. Dimana periode tersebut, penurunan angka persentase pengangguran terbuka hanya pada angka 1.28% (2018 ke 2019), sementara periode lainnya 2019-2020, persentase pengangguran justru naik.

Selain Luwu, Kota Palopo menjadi satu-satunya wilayah di Tanah Luwu yang pada tahun 2021, **jumlah pengangguran terbukanya menurun**. Sebab di Kabupaten Luwu Timur, pengangguran terbuka jumlahnya justru meningkat (1023 orang dari 7000-an menjadi 8000-an orang), Kabupaten Luwu Utara, meningkat sebanyak 1688 orang (dari 4054 menjadi 5742 orang).

## Faktor-faktor yang berpengaruh :

Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 telah mengambil sejumlah langkah strategis penanganan jumlah pengangguran di Kota Palopo selama masa pandemic 19. Beberapa diantaranya adalah :

- Memperluas cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis life skill dan fasilitasi akses pada lapangan berusaha
- Memastikan proyek proyek infrastruktur padat karya yang bersumber dari dana kelurahan mengakomodir tenaga kerja local masyarakat.
- Memastikan infrastruktur yang menunjang perekonomian mampu diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal
- Memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dijalankan perangkat daerah secara integrative dan bersinergi
- Menjaga dan mengoptimalkan produksi dan produktifitas daerah, investasi daerah dan menjaga ketahanan pangan daerah
- Mengoptimalkan bantuan-bantuan usaha kepada kelompok usaha masyarakat
- Memastikan bahwa seluruh aktifitas lapangan usaha kembali berjalan sesuai scenario *new normal* dengan protokol kesehatan
- Mengoptimalkan peran dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakselerasi ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah.

Berikut adalah table program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kota Palopo Tahun 2021 :

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	99,560,000	90,798,000	91.20
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	41,714,000	41,696,500	99.96
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	108,250,000	107,640,000	99.44
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	37,220,000	37,220,000.00	100.00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	56,105,000	55,999,380.00	99.81
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	516,550,000	506,550,000.00	98.06
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	322,573,000	245,398,400.00	76.08
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	68,538,619,250	50,791,909,625	74.11
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	69,527,500	68,398,778	98.38
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	50,100,000	47,500,000	94.81
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	500,975,400	500,029,780	99.81
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	35,189,000	35,184,800	99.99
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	36,850,000	36,358,275	98.67
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	14,699,500	14699500	100.00
<b>Jumlah Pagu</b>	<b>70,427,932,650</b>	<b>52,579,383,038</b>	<b>74.66</b>

### **Pencapaian Sasaran ke 10 : “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S10)” dengan Indikator Produktifitas Total Daerah**

Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan peningkatan produksi dan produktifitas daerah di Kota Palopo adalah meningkatnya angka produktifitas total daerah untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah, yang menjadi indikator tujuan pembangunan keempat Kota Palopo.

Pada tahun 2021 angka produktifitas total daerah Kota Palopo Tahun 2021 pada posisi 102.56 juta/tenaga kerja/tahun. Ini bermakna bahwa pada tahun 2021, satu orang angkatan kerja di Kota Palopo pada tahun lalu menghasilkan nilai tambah (nilai produksi barang dan jasa) rata-rata sebesar 102.6 juta dalam setahun.



Capaian ini masih berada dibawah target 2021 Kota Palopo 104.13 juta/tenaga kerja/tahun. Dengan demikian target kinerja 2021 yang bisa direalisasikan sebesar 98.5%. Meski demikian angka produktifitas total daerah 2021 Kota Palopo lebih meningkat atau lebih baik dibandingkan tahun 2020 (94.39 juta/tenaga kerja/tahun) dan 2019 sebesar 98.23 juta/tenaga kerja/tahunnya.

Terhadap target akhir RPJMD 2023, capaian 2021 ini masih dibawah target 2023 RPJMD, atau baru merealisasikan 88.60% target akhir RPJMD Kota Palopo Tahun 2023. Berikut adalah capaian kinerja indikator sasaran pembangunan daerah yang ke 10 Kota Palopo :

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2021		Terhadap RPJMD	
		2019	2020	Target Kinerja Tahun	Realisasi Kinerja Tahun	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Produktifitas Total Daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	98.23	94.39	104.13	102.56	98.5	115.75	88.60
Rata-Rata Kinerja Indikator Sasaran 10 Tahun 2021						98.5		

Jika dibandingkan dengan daerah lain secara regional, produktifitas total daerah di Kota Palopo Tahun 2021, masih belum lebih baik dari beberapa daerah di Sulsel. Angka produktifitas total daerah di Kota Palopo masih berada dibawah angka Sulsel (123.56 juta/tenaga kerja/tahun), atau kota Pare-Pare (104.62 juta/tenaga kerja/tahun), juga dibawah Kota Makassar (262.32 juta/tenaga kerja/tahun), kabupaten Luwu 104.02 juta/tenaga kerja/tahun. Berikut adalah perbandingan produktifitas total daerah Kota Palopo Tahun 2021 dengan indikator sejenis pada beberapa wilayah di Sulsel :

Berikut adalah perkembangan **komponen** yang mempengaruhi produktifitas total daerah Kota Palopo dalam tiga tahun terakhir :

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah Nilai Tambah Sektor (ADHB)	7,942,480	8,025,290	8,714,310
Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	80,854	85,026	84,969

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai tambah produksi barang dan jasa atas 17 lapangan usaha di Kota Palopo sesuai Harga Berlaku mengalami peningkatan dalam tiga terakhir. Jika tahun 2019 nilai produksi barang/jasa yang dihasilkan hanya berada pada angka 7,942 Triliun dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 80.854 orang, tahun 2021 meningkat menjadi 8,714 Triliun dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 84,969 orang.

**Nilai Tambah Sektor** berdasarkan ADHB Tahun 2021 Kota Palopo sesuai data BPS, berada lebih tinggi dibandingkan Kota Pare-Pare yakni 7.82 Trilyun, tapi masih berada dibawah angka nilai tambah produksi barang jasa Kota Makassar yakni 190,31 Trilyun. Berikut adalah perbandingan jumlah nilai tambah sector sesuai ADHB tahun 2021, beberapa wilayah di Sulawesi Selatan :

Indikator	Makassar	Pare-Pare	Sulsel	Palopo	Luwu	Luwu Utara
Jumlah Nilai Tambah Sektor	190,318,070	7,825,980	545,230,030	8,714,310	17,839,990	14,408,380
Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	725,529	74,806	441,2782	84,969	171,503	146,770

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi :

Semakin tinggi produktivitas total daerah akan membuat kinerja ekonomi semakin baik, sebagaimana tujuan pembangunan keempat yang ingin dicapai Kota Palopo periode 2018-2023..

Semakin tinggi angka produktivitas total daerah, akan mengurangi biaya produksi atau harga pokok produksi suatu barang dan jasa. Akibatnya harga jual bisa ditekan lebih murah sehingga barang/jasa tersebut mempunyai daya saing.

Bagi investor, angka produktifitas total daerah akan menjadi salah satu referensi untuk memutuskan investasi di berbagai bidang sesuai dengan peluang produktivitas daerah yang ada. Termasuk bagi penyusunan strategi pembangunan ekonomi. Disisi lain, investasi adalah salah satu tools dalam meningkatkan ekonomi daerah Kota Palopo.

Meskipun meningkat, angka produktifitas total daerah di Kota Palopo Tahun 2021, belum sesuai dengan target yang ditentukan dan masih lebih rendah dibandingkan produktifitas total daerah, secara regional di Sulsel. Beberapa factor yang mempengaruhi belum kompetitifnya angka produktifitas total daerah Kota Palopo bahkan belum mencapai target daerah 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan angka nilai tambah sector lapangan usaha di Kota Palopo belum atau kurang dibarengi dengan peningkatan dan penguasaan keterampilan dan kompetensi pekerja atau masyarakat yang berusaha : Produktivitas tenaga kerja tergantung pada tingkat keterampilan pekerja yang dapat didorong dengan peningkatan jam kerja, pelatihan, pendidikan, pendapatan/ balas jasa, jaminan keamanan kerja, dan kondisi kerja yang nyaman, aman serta sehat.
2. Penguasaan serta pemanfaatan teknologi dan modernisasi proses produksi barang dan jasa atau dalam proses aktifitas berusaha di Kota Palopo juga belum seperti atau sama dengan daerah lain. Dimana Kota Palopo masih perlu diakselerasi.
3. Kualitas angkatan kerja yang mencakup kompetensi tenaga kerja, menentukan tingkat produktivitas. Kualitas tenaga kerja yang rendah berdampak pada pemilihan teknologi yang juga rendah. Kombinasi keduanya akan menghasilkan tingkat produktivitas yang rendah. Penguasaan dan penerapan teknologi sebagai input dalam proses kerja, yang mengefisienkan biaya, waktu dan tenaga kerja.
4. Pengembangan sector-sektor formal potensial dan produktif yang ada di Kota Palopo, pemanfaatan atau optimalisasinya belum semassive beberapa daerah lain misalnya di Kota Makassar dan Kota Pare-Pare.

5. Pemanfaatan Bonus Demografi dalam proses produksi barang dan jasa pada 17 lapangan usaha belum banyak dimanfaatkan sehingga produktifitas tenaga kerja belum sekompetitif dengan daerah lain seperti Makassar dan Pare-Pare. Syarat utama untuk dapat menikmati bonus demografi adalah pekerja harus sehat, cerdas dan produktif.

#### Upaya/Solusi yang akan Dilakukan :

1. Sektor-sektor atau lapangan usaha yang mempunyai keunggulan kompetitif dan paling dominan memberi share bagi produktifitas daerah dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 di Kota Palopo, yakni perdagangan besar/eceran, pertanian/perikanan/kehutanan dan konstruksi akan berupaya diakselerasi oleh Pemerintah Kota Palopo pada tahun-tahun selanjutnya.
2. Lapangan usaha yang tumbuh cukup signifikan akan berupaya diakselerasi, sementara lapangan usaha yang nilai PDRBnya menurun akan dioptimalkan.
3. Lapangan usaha yang paling banyak/paling tinggi menyerap tenaga kerja akan diperbesar skala, volume dan jumlah usahanya di Kota Palopo. Termasuk sejumlah factor yang memberi pengaruh. Termasuk mengembangkan daerah potensial dan daerah yang sudah produktif.
4. Pengembangan produktifitas daerah pada sector produktif dan potensial dilakukan dengan meningkatkan pelatihan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang bekerja pada sector tersebut. Melalui serangkaian inovasi teknologi, penguatan kelembagaan dan sebagainya.
5. Pemerintah Kota Palopo akan memberikan perhatian yang lebih karena sektor yang memiliki keunggulan komparatif akan menjadi sektor basis yang akan meningkatkan perekonomian. Termasuk menjadikan sebagai potensi pendapatan daerah.
6. Pengembangan sektor potensial produktif diarahkan untuk dapat membuka kesempatan kerja, peningkatan pendapatan

Berikut adalah table program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan produktifitas total daerah Kota Palopo Tahun 2021 :

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Pengembangan Umkm	36,850,000	36,358,275	98.67
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	3,700,000	3,700,000	100.00
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	3,650,000	3,650,000	100.00
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	7,650,000	7,650,000	100.00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	244,285,100	218,334,500	89.38
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	408,473,400	401,607,850	98.32
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	53,932,000	53,716,000	99.60
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4,505,570,559	4,494,247,068	99.75
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	168,066,000	167,652,870	99.75

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Penyuluhan Pertanian	387,666,000	387,186,231	99.88
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	55,925,000	55,697,000	99.59
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	308,101,100	308,097,800	100.00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,021,769,750	789,143,000	77.23
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	58,705,000	58,704,550	100.00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	99,316,126	96,053,600	96.72
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	41,714,000	41,696,500	99.96
Program Pelayanan Penanaman Modal	516,550,000	506,550,000.00	98.06
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	322,573,000	245,398,400.00	76.08
<b>Jumlah</b>	<b>8,244,497,035</b>	<b>7,875,443,644</b>	<b>95.52</b>

**Sasaran XI : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)** dengan 2 (dua) Indikator Sasaran yakni Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) dan Kontribusi PAD Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)

Sasaran pembangunan daerah Kota Palopo yang ke 11 adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah, dengan dua indikator yakni Kontribusi **PAD Pariwisata** terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) dan Kontribusi **PAD Ekonomi Kreatif** terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%).

Tingkat realisasi kinerja pencapaian sasaran ke 11 tahun 2021 berada pada angka 68.18% dengan predikat kinerja cukup. Capaian 2021 ini sudah lebih baik atau meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 yang berada pada posisi 45.95%.





Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2021		% Tingkat Realisasi	Target 2023	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD
		2019	2020	Target	Realisasi			
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	5.12	0.02	5	0.31	6.20	7	4.43
	Kontribusi PAD Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	3.76	2.26	3.78	4.92	130.16	3.89	126.48
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 11						68.18		

## Sektor Pariwisata

Agustus 21, 2021

### Kambo Masuk Nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, Satu-satunya di Tana Luwu

Redaktur TerasKata - HEADLINE, Teras Luwu Raya -



**Tahun 2021, Kontribusi PAD Pariwisata** terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada posisi 0.31%, yang lebih baik atau lebih tinggi dari realisasi kinerja tahun 2020 yang berada pada angka 0.02%, tetapi belum lebih baik dari kondisi realisasi kinerja tahun 2019, dimana PAD Pariwisata mampu memberi share sebesar 5.12% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo Tahun 2019.

Meski demikian, nilai PAD sector pariwisata tahun 2021 pada angka Rp. 434,380,324.- lebih tinggi atau meningkat dibandingkan PAD pariwisata tahun 2020 yang hanya berada pada angka Rp. 49.680.000,-

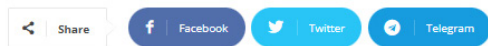
Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
Nilai PAD Sektor Pariwisata	Rp. 49.680.000,-	Rp. 434,380,324

## Sektor Ekonomi Kreatif

### Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Palopo Dukung Pengembangan Kreatifitas Pemuda

Penulis Redaksi - 4 Agustus 2019

993



Peserta event Fashion Weekend diatas panggung kreatif.

**Sementara untuk sector ekonomi kreatif**, tahun 2021 kontribusinya terhadap PAD berada pada angka 4.92%, jauh meningkat atau lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka 2.26% bahkan juga melampaui angka realisasi tahun 2019 yang berada pada angka 3.76%.

Nilai PAD sector ekonomi kreatif Tahun 2021 sebesar Rp. 6,894.036.118,- lebih tinggi atau meningkat dibandingkan PAD ekonomi kreatif tahun 2020 yang hanya berada pada angka Rp. 5.009.500.361,-. Berikut adalah perbandingan nilai nominal besar PAD dari sector pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Palopo Tahun 2020 dan 2021 di Kota Palopo.

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021
Nilai PAD Sektor Ekonomi Kreatif	Rp. 5.009.500.361,-	Rp. 6,894.036.118

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi :

Meskipun nilai PAD baik dari sector pariwisata dan ekonomi kreatif meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun peningkatan itu belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Dampaknya kinerja pencapaian sasaran ke 11 Kota Palopo Tahun 2021, belum sesuai dengan target yang diperjanjikan. Beberapa factor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagai respon Pemerintah untuk menangani penyebaran Pandemi Covid 19, sangat berdampak buruk terhadap seluruh Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Angka kunjungan wisatawan local ke sejumlah destinasi wisata di Kota Palopo kondisinya belum seperti tahun 2019, meskipun tahun 2020 ke 2021, kondisinya mulai pulih, tapi tidak belum seperti kondisi tahun 2019.
2. Iven-iven public yang bisa mendatangkan atau meningkatkan angka kunjungan ke Kota Palopo, sepanjang tahun 2021, jumlahnya juga sangat minim dilakukan mengingat masih adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Ini menyebabkan pendapatan asli daerah baik pariwisata maupun ekonomi kreatif, kondisinya belum normal seperti kondisi dimana covid 19 belum menjadi pandemic. Kondisi ini diikuti difocusingnya sejumlah anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana wisata, promosi wisata, dan pengembangan sektor ekonomi kreatif, sebagai salah satu alternative kebijakan fiskal daerah, terhadap trend pendapatan daerah yang menurun.

- Meski target PAD baik pariwisata maupun ekonomi kreatif belum memenuhi target daerah, tetapi nominal jumlah PAD dari dua sektor ini mulai menunjukkan kecenderungan yang meningkat atau lebih baik dari kondisi tahun 2020 yang menjadi puncak merebaknya pandemic covid 19.

### Solusi yang dilakukan :

- Meningkatkan daya Tarik destinasi wisata di Kota Palopo dengan mengelaborasi peranan dinas pariwisata dalam menangani dan mengelola spot pariwisata yang ada, dengan sejumlah program perangkat daerah lain.
- Memastikan keteraksesan infrastruktur jalan dan prasarana lain yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas PU juga menjamah sejumlah spot destinasi wisata yang ada di Kota Palopo dengan memastikan kualitas kemandapan jalan ke spot destinasi berada dalam kondisi mantap. Dan disisi lain juga memastikan keteraksesan tersebut terhadap moda transportasi public yang tersedia ke spot destinasi.
- Mengelaborasi peranan dinas kebersihan dan lingkungan hidup juga berperan dalam penataan ruang terbuka hijau pada spot destinasi wisata yang ada di Kota Palopo, termasuk memastikan adanya sarana prasarana persampahan dan menjaga kebersihan spot destinasi yang ada.
- Memastikan bahwa pengendalian pencemaran dan potensi kerusakan lingkungan hidup pada wilayah yang menjadi penyangga spot destinasi berbasis sumber daya alam, terlindungi melalui program-program edukasi masyarakat dan edukasi public tentang lingkungan hidup terutama soal partisipasi masyarakat di sekitar spot destinasi terus berkelanjutan. Termasuk sumber daya air, yang banyak menjadi komoditas pada sejumlah spot destinasi wisata Kota Palopo.
- Untuk wisata yang berbasis iven, pemerintah Kota Palopo juga akan berupaya mengoptimalkan sejumlah iven-iven olahraga yang mampu mendatangkan kunjungan yang lebih banyak ke Kota Palopo, melalui serangkaian iven olahraga yang ada.
- Iven-iven kesenian dan kebudayaan serta wisata heritage lainnya ikut berkembang melalui peran dinas kebudayaan dan ke-PU- untuk memastikan pembenahan dan penanganan sejumlah spot wisata atau iven wisata yang ada.
- Terakhir adalah memastikan adanya sinergi yang lebih kuat pada berbagai sector dan berbagai perangkat daerah dalam memulihkan kondisi pariwisata dan ekonomi kreatif daerah, sehingga mampu memberi kontribusi dan share yang sesuai dengan target daerah dan lebih baik dari kondisi tahun sebelumnya.

Berikut adalah tabel program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo dalam mencapai sasaran ke sebelas pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2021 :

**Tabel**  
**Program dan Realisasi Keuangan Sasaran 11**

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	91,240,000	84,107,800	92.18
Program Pemasaran Pariwisata	60,203,000	60,134,560	99.89
Program Pengembangan Kebudayaan	248,949,826	47,374,120	99.37
Program Pembinaan Sejarah	28,369,000	28,369,000	100.00

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	64,185,250	64,178,250	99.99
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	500,975,400	500,029,780	99.81
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Ngkutan Jalan (Llaj)	897,640,000	896,598,000	99.88
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	2,540,890,000	2,537,835,500	99.88
Program Penyelenggaraan Jalan	4,493,346,089	4,471,234,076	99.51
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	240,511,250	240,379,123	99.95
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	141,454,250	141,404,000	99.96
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,594,456,950	3,587,241,150	99.80
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	37,370,000	37,370,000	100.00



## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo merupakan perwujudan pertanggungjawaban tahunan atas RPJMD Kota Palopo Tahun 2019-2023. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Palopo telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparat Pemerintah Kota Palopo serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Kota Palopo sebagai kota maju, inovatif dan berkelanjutan pada tahun 2023. Pemerintah Kota Palopo secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar **94,53%** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; mendorong percepatan proses pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan; meningkatkan profesionalisme aparatur pegawai pemerintah dan pengawasan; dan mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.



